



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN



**HENDRI CAHYA DWI SANCAKA
(NDH. 08)**



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
PUSDIKMEN 2023**

**IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN
INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA
MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH
PERAIRAN**



**HENDRI CAHYA DWI SANCAKA
(NDH. 08)**



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
PUSDIKMIN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT
KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN
HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN**

Peserta Pelatihan

AKBP HENDRI CAHYA DWI SANCAKA
NDH 08

Telah disetujui pada tanggal November 2023
Di Pudikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach

Mentor

AKBP Grace K. Rahakbau, S.IK., M.Si.

KOMBES POL Dadan, S.H., M.H.



HENDRI CAHYA DWI SANCAKA-NDH-08

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan Hidayahnya sehingga penulisan laporan akhir implementasi proyek perubahan yang berjudul Strategi Korpolaairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur laut Kepulauan Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan ini dapat diselesaikan. Laporan akhir proyek perubahan ini merupakan persyaratan dalam penyelesaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Pusdikmin Polri.



Project Leader dalam proyek perubahan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perencanaan & implementasi Proyek Perubahan ini antara lain :

1. Kakorpolairud Baharkam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Indra Miza, M.Si
2. Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi M. Yassin Kosasih M.Si.
3. KBP. Drs. Dadan, S.H, M.H, Kasubdit Patroli Air yang sekaligus Mentor dalam Proyek perubahan
4. AKBP. GRACE K. RAHAKBAU, S.I.K , M.H. Selaku Waka Pusdikmin, yang sekaligus sebagai Coach
5. Capt. Hendri Ginting, Direktur lalu Lintas & Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan RI.
6. Jon Kenedi, M.Eng.,M.M, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan RI.
7. Dirpolairud Polda Metrojaya, Kombes Pol. Joko Sadono, S.H, M.H, M.Han
8. Eksekutif General Manager PT. Pelindo Tanjung Priok, Bapak Adi Sugiri
9. Kepala Kantor Kesyahbandar Utama Tanjung Priok, Capt. Weku Frederik Karuntu, M.M
10. Kepala KPLP Tanjung Priok, Triono S. Pel. M.M
11. Team Efektif Proyek perubahan.

Semoga Proyek perubahan ini dapat bermanfaat bagi pengamanan wilayah perairan di Indonesia.

Project Leader

Hendri Cahya Dwi Sancaka

EXECUTIVE SUMMARY

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terbuka bagi semua kapal yang akan melintasi perairan Indonesia secara langsung dan terus-menerus berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 untuk keperluan melintas dari suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya, akan tetapi harus mematuhi hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan.

Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Dengan adanya keterbatasan jumlah dan sarana patroli laut dan udara, kemampuan pengawasan dan sarana maritime surveillance yang dimiliki oleh Korpolaairud dalam pengamanan di ALKI. Wilayah ALKI memberikan indikasi kuat akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ALKI oleh kapal-kapal asing antara lain perdagangan narkoba, penyelundupan, pembuangan limbah berbahaya dan kegiatan ilegal lainnya. Strategi pengamanan ALKI yang ideal dilaksanakan melalui kerjasama antar Stakeholder secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan penggelaran penindakan dilakukan melalui penempatan unsur-unsur di koordinat yang kemungkinan besar terjadi kejahatan dan pelanggaran di laut.

Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini belum terdapat implementasi patroli secara khusus pada ALKI oleh Kapal Patroli Polisi karena belum terbitnya SOP pengamanan ALKI maupun anggaran khusus patrol pengamanan ALKI. Issue lainnya Belum adanya Transformasi Digital yang terintegrasi dalam Pengamanan Wilayah Perairan ALKI, belum terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder dalam Pengamanan Wilayah Perairan ALKI serta Pengamanan Wilayah Perairan ALKI Terjadi Keterlambatan dalam Tindakan dan percepatan. Inovasi Yang dilakukan pada Proper adalah :Analisis Kebijakan, Audiensi & FGD , Penerbitan Kebijakan PerKaba (Kabaharkam), Penyusunan SOP & Buku Panduan, Pengusulan Anggaran Pam ALKI serta Pengadaan Armada Patroli ALKI. Proyek Perubahan ini merupakan peran penting Korpolaairud Baharkam Polri Dalam menjaga harkamtibmas Wilayah Perairan ALKI yang sampai saat ini belum dilakukan kegiatan patrolinya secara khusus. **Kondisi Saat ini** : Belum optimalnya peran Korpolaairud dalam menjaga Harkamtibmas di Perairan ALKI .**Locus** : Korpolaairud Baharkam Polri. **Solusi** : Analisis Kebijakan.Audiensi & FGD ,Penyusunan SOP, Draft Kebijakan PerKaba, Patroli ALKI, Anggaran & SDM Patroli ALKI. **Kondisi Yang Diharapkan** : Peran Korpolaairud dalam menjaga Harkamtibmas di Perairan ALKI Menjadi Optimal.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ANALISIS MASALAH	6
C. TUJUAN & MANFAAT	12
D. KAITAN ANTAR PROPER DENGAN RBT.....	14
E. RUANG LINGKUP	14
F. OUTPUT & OUTCOME	15
G. TAHAPAN (MILESTONE)	16
II. IMPLEMENTASI TAHAPAN PROPER	18
III. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS	30
IV. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	32
V. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR	41
VI. KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROPER	49
VII. KETERKAITAN MATA PILIHAN	51
VIII. PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)	52
LESSON LEARNT	53
LAMPIRAN	54



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terbuka bagi semua kapal yang akan melintasi perairan Indonesia secara langsung dan terus-menerus berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 untuk keperluan melintas dari suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lainnya, akan tetapi harus mematuhi hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan.

Indonesia harus dapat mengendalikan dan mengamankan ALKI dengan menghadirkan kekuatan laut di sepanjang ALKI dalam rangka upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Dengan adanya keterbatasan jumlah dan sarana patroli laut dan udara, kemampuan pengawasan dan sarana maritime surveillance yang dimiliki oleh Korpolairud dalam pengamanan di ALKI. Wilayah ALKI memberikan indikasi kuat akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ALKI oleh kapal-kapal asing antara lain perdagangan narkoba, penyelundupan, pembuangan limbah berbahaya dan kegiatan ilegal lainnya. Strategi pengamanan ALKI yang ideal dilaksanakan melalui kerjasama antar Stakeholder secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Strategi Pengamanan ALKI Dalam Penegakkan Kedaulatan Hukum Laut Indonesia”

Perlu adanya peningkatan kerjasama (interoperability) antar Stakeholder melalui strategi dan upaya diarahkan melalui penempatan dan disposisi unsur dengan memanfaatkan pangkalan terdekat, menerapkan pola rotasi dan kombinasi penggunaan semua unsur pada titik-titik strategis, mendorong keterpaduan dengan institusi samping, dan meningkatkan profesionalisme personil dan kemampuan satuan operasi.

Kondisi Geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup penting dalam Kawasan maritim dunia, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan dan transportasi laut dunia sehingga pemerintah menetapkan Tol laut sebagai bagian dari Fokus pembangunan nasional.

Meningkatnya jumlah arus pelayaran yang melintasi perairan Indonesia karena perkembangan aspek hubungan internasional pada kawasan global dan diramaikan dengan perdagangan bebas serta dominasi pembangunan ekonomi di laut oleh negara-negara maritim, sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran. Terjaminnya keamanan keselamatan pelayaran memberikan rasa aman terhadap pengguna laut yang secara langsung akan meningkatkan volume perdagangan dan pelayaran yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara dari sektor kelautan serta memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian bangsa.

“Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di hadapan peserta Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung International Maritime Organization (IMO)

London, Inggris (19/4). Bagi bangsa Indonesia, menurut Presiden, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik serta dikenal sebagai bangsa pelaut. “Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu (fulcrum) dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Pemerintahan yang sekarang dipimpinnya, menurut Presiden, berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Meningkatnya jumlah arus pelayaran yang melintasi perairan Indonesia karena perkembangan aspek hubungan internasional pada kawasan global dan diramaikan dengan perdagangan bebas serta dominasi pembangunan ekonomi di laut oleh negara-negara maritim, sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Geostrategi negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek antara lain : aspek geografi, aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bila dilihat dari negara – negara sekitar. Geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang didalam pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pemerintah Indonesia perlu memberi akses melintas bagi kapal-kapal asing guna melakukan navigasi, dalam rangka melindungi kapal – kapal yang melakukan lintas damai dan melindungi kepentingan nasional dijalur ALKI maka perlu dilaksanakan patroli oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri.

Berdasarkan kepentingan diatas maka dibuatlah Peraturan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam Polri Tentang Patroli ALKI Nomor 1 Tahun 2016. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut termasuk ruang udara diatasnya yang merupakan suatu rangkaian dari poros yang bersambungan dimulai dari alur masuk rute hingga alur keluar diperairan kepulauan dan wilayah udara. Kapal dan pesawat udara yang melintas alur laut tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut pada jalur kedua sisi garis poros tersebut, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang lebih dekat kepantai 10% dari jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut. Zona Terlarang adalah zona yang ditetapkan di sekeliling instalasi yang lebarnya 500 (lima ratus) meter dari titik-titik terluar instalasi atau titik-titik lainnya yang merupakan bagian tetap instalasi. Hak Lintas ALKI adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk melintas sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui perairan kepulauan Indonesia, antara satu bagian dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan bagian laut lepas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

“Peran Korpolaairud Baharkam Polri Terhadap Pengamanan ALKI”

Permasalahannya adalah sampai dengan saat ini belum terdapat implementasi patroli ALKI tersebut menyangkut Kebijakan, personil, Anggaran maupun masih terbatasnya Armada, Sarana & Prasarana.

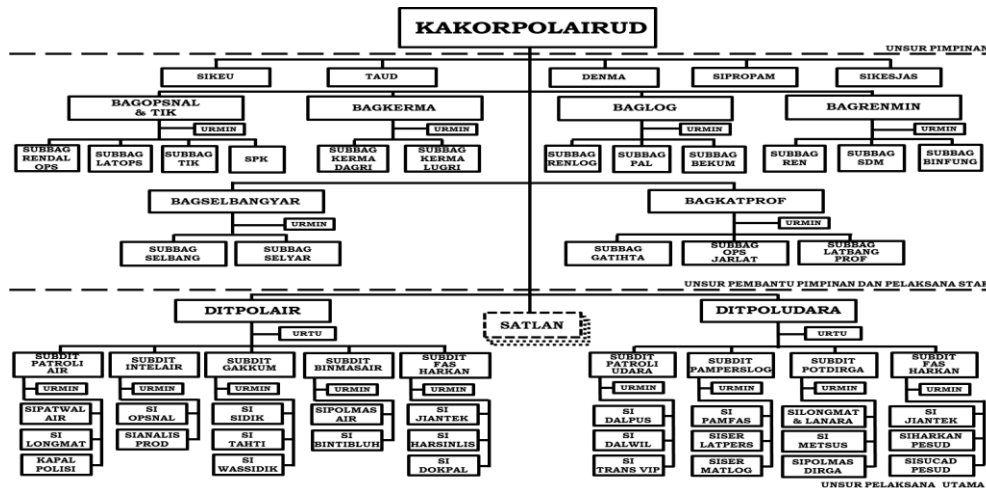
Issue Strategis lainnya :

- a. Belum adanya Transformasi Digital yang terintegrasi dalam Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
- b. Belum terintegrasinya data dan Informasi antar Stakeholder dalam Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
- c. Pengamanan Wilayah Perairan ALKI Terjadi Keterlambatan dalam Tindakan dan percepatan.



PROFIL ORGANISASI

a. Visi & Misi Organisasi



Visi Korpolaairud :

Terwujudnya Harkamtibmas & Gakkum Wilayah Perairan Serta Terselenggaranya Operasional Penerbangan Polri

Misi Korpolaairud :

Meningkatkan Pencegahan, Penanganan Gangguan Kamtibmas & Gakkum Wilayah Perairan Serta Operasional Penerbangan

b. Tugas & Fungsi Organisasi

TUGAS KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

1. Menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Memberikan dukungan kegiatan kepada seluruh fungsi Kepolisian, kewilayahan dan K/L;
3. Melaksanakan peningkatan kemampuan pelatihan fungsi Kepolisian Perairan dan Udara;
4. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengindraan keamanan perairan Indonesia;
5. Menyelenggarakan sentra pelayanan pelaporan dan pengaduan masyarakat perairan;
6. Menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Korpolaairud guna mendukung pelaksanaan tugas Korpolaairud Baharkam Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

c. Tugas & Fungsi Peserta

Tupoksi Subdit patroliair

- a. Menyelenggarakan dan memberikan petunjuk serta arahan mengenai patroli perairan dan pengawalan sertamelakukan pencarian, pertolongan, serta penyelamatan korban bencana alam/musibah;
- b. Memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan TPTKP serta penegakan hukum di wilayah perairan;
- c. Menyusun rencana kegiatan Sipatwalair dan Silongmat, beserta pertanggungjawabannya;
- d. Merencanakan dan mengusulkan personel yang akan ditugaskan sebagai awak Kapal Polisi untuk diajukan kepada Dirpolair;
- e. Menyusun rencana penugasan kapal polisi, personel dan rencana kebutuhan anggarannya untuk diajukan ke Dirpolair;
- f. Mengendalikan kapal polisi dalam rangka operasional dengan memberikan petunjuk dan arahan tentang penanganan terhadap kejahatan/pelanggaran yang ditemukan di perairan;
- g. Menyusun konsep sistem dan metode berkaitan dengan bidang tugas dan fungsinya
- h. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan patroli dan pengawalan yang dilakukan oleh kapal polisi;
- i. Memelihara dan meningkatkan kemampuan / keterampilan personel Subdit Patroli Air, berkoordinasi dengan Subsatker lainnya;
- j. Mengajukan dukungan operasional kapal kepada Dirpolair dan mendistribusikan kepada awak kapal yang bertugas berdasarkan surat perintah Kakorpolairud;
- k. Menyelenggarakan pemberangkatan maupun penerimaan kapal tiba di pangkalan serta membuat laporannya;
- l. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap personel dan kapal polisi baik yang sedang bertugas maupun yang berada di pangkalan;
- m. Melaksanakan dukungan transportasi perairan dalam rangka tugas kepolisian;
- n. Menyusun laporan kegiatan secara periodik;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Dirpolair Baharkam Polri;



B. ANALISIS MASALAH

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

Pelanggaran yang terjadi di wilayah ALKI yang dilakukan oleh kapal asing biasanya terkait dengan hak lintas kapal asing, yaitu hak lintas damai dan hak lintas kepulauan. Contoh pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah ALKI seperti penyelundupan senjata ilegal, kasus penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang, kasus kepabeanan, pengangkutan imigran gelap, human trafficking, pencemaran atau polusi laut, penangkapan ikan secara ilegal termasuk yang dilindungi, kegiatan pemeriksaan ilegal dan berbagai tindak pelanggaran lainnya.

Membaca dinamika dan tantangan pada jalur ALKI dan perairan sekitarnya, pemerintah perlu menyeimbangkan pengembangan gagasan poros maritim dengan peningkatan kualitas keamanan wilayah laut. Indonesia berpotensi untuk mengalami kerugian besar jika laut sebagai aset strategis tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlu diperhatikan aspek pengawasan dan pengamanan utamanya terhadap kemungkinan infiltrasi dan subversi, termasuk didalamnya jaminan keamanan terhadap pengelolaan sumberdaya laut di sepanjang dan di sekitar ALKI. Implementasi dari konsep ketahanan nasional perlu diperhitungkan untuk menciptakan kondisi dinamis, terutama kesiapan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan pada seluruh wilayah perairan Indonesia.

Kepemimpinan 4.0, yang juga disebut sebagai pemimpin digital adalah bukan mengenai status, posisi kekuasaan, kontrol, dan pangkat yang merupakan bagian dari budaya 'kepemimpinan kekaisaran' dan kharisma. Pemimpin 4.0 tidak akan mengambil keputusan atau menjadi pembuat keputusan eksekutif tunggal atau pembuat ide. Keahlian berikutnya yang juga penting dimiliki seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan dalam komunikasi dan sosialisasi. Pengamanan wilayah perairan ALKI harus dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem berbasis digital.

Penerapan teknologi Informasi dalam pengamanan Wilayah Perairan pada akhirnya melakukan pemberdayaan suatu team secara terorganisasi, Korpolaairud dapat melakukan monitoring dan evaluasi dan mendapatkan informasi dan database untuk potensi ancaman dan memberikan alternatif solusi bagi peningkatan kompetensi para anggota Korpolaairud.

Program (Action Plan) yang seharusnya di jalankan adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan anggaran khusus untuk pembuatan sistem pengamanan wilayah perairan ALKI
- b. Pembangunan Jaringan Infrastruktur internet di kepulauan luar Indonesia
- c. Pengembangan literasi digital dan SDM Digital di organisasi Korpolaairud
- d. Kolaborasi antar stakeholder dalam pengamanan wilayah perairan ALKI secara digital
- e. Pembangunan sistem pengamanan wilayah perairan ALKI berbasis teknologi informasi

Kepolisian Perairan dan Udara sebagai amanah dalam kepemimpinan digital menjaga wilayah perairan seharusnya secara khusus melakukan patroli dengan armada kapal yang canggih dn terintegrasi secara digital dan Kolaboratif serta menyiapkan semua sarana dan prasarana dalam mendukung AKLI tersebut sehingga tidak menjadi gangguan keamanan yang membahayakan kekayaan laut dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Potensi pelanggaran di perairan Indonesia dari tahun ke tahun semakin beragam. Pelanggarannya bukan hanya pada persoalan illegal fishing saja semisal (i) pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap; (ii) ketidaklengkapan dokumen perizinan penangkapan; dan (iii) tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi. Namun, bentuk pelanggaran itu telah meluas pada aspek lainnya, seperti human trafficking, pasokan dan peredaran Narkoba, pasokan dan distribusi senjata untuk kepentingan kejahatan umum dan terorisme, rute imigran gelap, dan kejahatan internasional lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran seperti ini bukan saja merugikan negara Indonesia secara ekonomi, tetapi juga secara sosial politik telah menjatuhkan dan mengancam.

Penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing selama ini sangat merugikan Indonesia. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian ikan ini mencapai US\$ 20 miliar atau sekitar Rp 260 triliun. Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita.

Pemerintah terus berupaya memberantas pencurian ikan di laut Indonesia. Bahkan menunjukkan tindakan tegas, salah satunya dengan melakukan penangkapan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 236 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan di perairan Indonesia.

Di Indonesia sendiri, besar kerugian yang dialami negara dari praktik illegal fishing setidaknya USD 4 miliar per tahun, sementara estimasi untuk kerugian praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing mencapai USD 15,5 miliar sampai USD 36,4 miliar dari 11-26 juta ton ikan yang ditangkap. Khusus di wilayah Samudera Pasifik, mencapai 4-7 juta ton per tahun dengan nilai USD 4,3 miliar hingga USD 8,3 miliar.



Data Penegakkan Hukum Ditpolair korpolaairud Baharkam Polri pada tahun 2023 telah melakukan Pengungkapan kasus Tindak Pidana di perairan Sebanyak 93 kasus.

NO	PELANGGARAN		JUMLAH
	KASUS PERKARA		
1	2		3
A	KONVENSIONAL		20
1	Pelayaran		7
2	Pencurian		1
3	Penadahan		1
4	Penggelapan		1
5	Pemalsuan Dokumen		1
8	Perdagangan		3
10	Penipuan		1
14	Cukai		5
6	KEKAYAAN NEGARA		49
1	ILLEGAL FISHING	KIA	6
		Baby lobster (BL)	10
		Kepiting telur	0
		Alat tangkap(trawl,omsi)	7
		Dokumen	4
		Destruktif Fishing (Bius/Bom Ikan)	1
2	Handak		6
3	Illegal Logging		5
4	Minerba		6
5	Illegal Oil (Migas)		2
7	Karantina		1
8	KSDA		2
C	ANTAR NEGARA		23

1	Kepabeanan	1
2	Keimigrasian	8
3	Narkotika	12
4	TPPO	2
	JUMLAH	93

Meski sudah dilarang, penyelundupan benih lobster masih saja terus terjadi. Padahal pemerintah tengah mendorong pembudidayaan dalam negeri supaya dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar ketimbang jual anakan.

Setidaknya dari 2021 kemarin Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mencatatkan 52 kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan dalam periode 23 Desember 2020 - 15 Agustus 2021 yang tersebar di Jambi, Jawa Timur, Palembang, Banten, Jakarta, Batam, Mataram, Lampung, Kepulauan Riau, Bandung, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Cirebon.

Total benur yang diselamatkan dari kasus-kasus tersebut mencapai 3.873.775 ekor dengan rincian, BBL jenis pasir sebanyak 3.710.838 ekor dan BBL jenis mutiara sebanyak 162.937 ekor, dengan perkiraan nilai BBL yang diselamatkan sebesar Rp 159,9 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berhasil menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 300 ribu ekor atau setara Rp30 miliar di Batam.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster bernilai miliaran rupiah. Ratusan ribu benih lobster ini ditaksir senilai Rp46,7 M, selain itu juga terhadap pelaku sampai dengan saat ini sedang dilakukan pengembangan dan pengejaran.

Berdasarkan latar belakang dan data data :

No	Deskripsi	Nilai	Keterangan
1	Peredaran Narkoba	80 Persen	Terjadi lewat Jalur Laut
2	Kerugian Negara akibat Illegal Fishing	56 Trilyun	Pertahun
3	Terumbu Karang Rusak	65 %	
4	Kapal Asing	236	Di Tenggelamkan
5	Penyelundupan Benih Lobster	15.000.000 Per ekor	Pertahun

Maka terdapat beberapa permasalahan terutama berkaitan dengan Patroli air di wilayah ALKI sebagai berikut :

1. Wilayah Perairan ALKI rawan Tindakan Kejahatan & Illegal
2. Potensi Sumberdaya Laut Indonesia Dimanfaatkan Negara Asing
3. Kerjasama antar Stakeholder dalam menjaga harkamtibmas wilayah perairan belum terintegrasi dengan baik
4. Tindakan illegal dalam wilayah perairan semakin canggih dengan Teknologi
5. Masyarakat Nelayan & Pesisir Pantai terdampak secara ekonomi.

Penyebab Masalah :

1. Kebijakan Ditpolair Belum Menginstruksikan Patroli ALKI
2. Keterbatasan Anggaran dalam Pengamanan ALKI
3. Sarana & Prasarana belum memadai untuk melakukan Patroli ALKI
4. Standar Operasional Prosedur Belum terbit untuk Patroli ALKI
5. Ego Sektoral Lembaga Pemerintah
6. Teknologi Digital belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penguatan Armada Korpolaairud.



STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

Penentuan Masalah Organisasi

Pada Aksi perubahan ini dirancang untuk penentuan masalah yaitu bagaimana strategi Korpolaairud Baharkam polri dalam pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) untuk meningkatkan Harkamtibmas wilayah perairan. Pada analisisnya menggunakan SOAR.

Tabel 1 : Analisis SOAR



TEROBOSAN INOVATIF

Inovasi yang dilakukan pada aksi perubahan yang dirancang melalui Alur pikir sebagai berikut

Gambar 1 : Alur Pikir Aksi Perubahan



Maka Inovasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Kondisi Saat Ini :

1. Kebijakan (PerKaba) Untuk Patroli Wilayah ALKI Belum Terbit
2. SOP untuk Patroli Wilayah ALKI Belum ada
3. Pengamanan Wilayah Perairan ALKI belum dilakukan secara khusus
4. Anggaran khusus untuk patroli pengamanan ALKI belum ada
5. Penguatan Sarana & Prasarana Untuk Pengamanan Wilayah Perairan ALKI perlu dilaksanakan
6. Pengamanan Wilayah Perairan ALKI belum terintegrasi dengan Stakeholder dengan baik

Kondisi Yang Diharapkan :

1. Terbitnya Kebijakan (PerKaba) Untuk Patroli Wilayah ALKI .
2. Adanya SOP untuk Patroli Wilayah ALKI.
3. Dilaksanakannya Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
4. Terlaksananya Penyiapan Tambahan Anggaran untuk Armada Patroli
5. Adanya Penguatan Sarana & Prasarana Untuk Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
6. Pengamanan Wilayah Perairan ALKI terintegrasi dengan Stakeholder

Inovasi Yang dilakukan :

1. Analisis Kebijakan
2. Audiensi & FGD
3. Penerbitan Kebijakan PerKaba (Kabaharkam)
4. Penyusunan SOP & Buku Panduan
5. Pengusulan Anggaran Pam ALKI
6. Pengadaan Armada Patroli ALKI
7. Penguatan Sarana & Prasarana

Nilai Tambah Bagi Organisasi & Stakeholder

Aksi perubahan ini memberikan nilai tambah bagi organisasi Korpolaairud yaitu adanya kegiatan patroli perairan ALKI yang sebelumnya belum dilakukan sehingga dapat menjaga Harkamtibmas di wilayah ALKI tersebut dari tindakan ilegal dan kejahatan yang mengancam perairan Indonesia. Nilai tambah Organisasi terkait juga dengan tematik Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Investasi untuk menjadikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Dan Tol Laut sehingga Harkamtibmas Wilayah Perairan ALKI harus terjaga.



Kebaharuan

Adapun kebaruan dari Aksi perubahan ini yaitu adanya kebijakan dari Dirpolair/Kakorpolairud dalam kegiatan Patroli ALKI melalui Pembaharuan Surat Perintah .

Dapat di Replikasi

Aksi Perubahan ini merupakan program pembaharuan atau turunan suatu kebijakan yang dapat juga dilakukan pada Satker lain baik internal Polri maupun instansi pemerintah sesuai Tupoksi Organisasi dalam menjaga keamanan nasional dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dapat Diterapkan Secara Berkelanjutan

Aksi Perubahan ini merupakan aksi perubahan yang dirancang untuk kegiatan patroli ALKI perairan yang belum dilakukan dan kegiatan Patroli ALKI perairan harus dilakukan terus menerus untuk mengantisipasi ancaman negara lain dalam eksploitasi Laut Indonesia maupun tindakan illegal lainnya sehingga akan terus berlanjut kebutuhannya.

Kesesuaian dengan nilai nilai organisasi

Aksi perubahan ini sesuai dengan nilai nilai organisasi Korpolairud yaitu dalam rangka preemtif, preventif dan Represif dari tugas pokok dan misi Korpolairud dalam menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan ALKI.

C. TUJUAN & MANFAAT

Tujuan Proper

a. Tujuan Jangka Pendek

1. Menganalisis Kebijakan Dirpolair Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
2. Melakukan FGD dengan Stakeholder Untuk Penerbitan PerKaba
3. Melakukan Penyusunan Draft Perkaba Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
4. Penyusunan Standar Operational Prosedur & buku Panduan Untuk Patroli Wilayah ALKI
5. Melaksanakan Sosialisasi Draft PerKaba di Korpolairud



b. Tujuan Jangka Menengah

1. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan PerKaba di Ditpolairud yang dilalui ALKI Seluruh Indonesia
2. Melaksanakan Pengesahan PerKaba Tentang Pengamanan Wilayah ALKI
3. Penyusunan Tambahan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan, Pengadaan Armada , Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI di Korpolaairud
4. Pengajuan Tambahan Patroli Khusus Pengamanan, Anggaran Pengadaan Armada , Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI ke Mabes Polri

c. Tujuan Jangka Panjang

1. Pengadaan Kebutuhan Patroli Khusus Pengamanan, Armada, Sarana & Prasarana Untuk Patroli Perairan ALKI
2. PKS antar Stakeholder di wilayah perairan ALKI untuk Sinergitas Pengamanan Perairan
3. Implementasi Patroli di semua Wilayah Perairan ALKI Secara Keberlanjutan

Manfaat Proper

a. Manfaat Internal (Korpolaairud)

1. Meningkatkan kinerja organisasi dalam menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan
2. Pencapaian sasaran strategis Korpolaairud dalam peningkatan Harkamtibmas Di Wilayah Perairan
3. Meningkatnya kapabilitas, kinerja dan profesionalitas penegak hukum Korpolaairud
4. Terwujudnya Korpolaairud yang Presisi.

b. Manfaat Eksternal (Pemerintah)

1. Sebagai wujud dan dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun Tol laut dan poros Maritim.
2. Adanya kebijakan yang tepat sasaran bersama dengan stakeholders eksternal untuk mewujudkan Program pemerintah
3. Pengelolaan hasil kekayaan Wilayah Perairan menjadi efektif untuk meningkatkan perekonomian
4. Menjaga Kedaulatan perairan Indonesia dari ancaman Pihak Asing Yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia

c. Manfaat Eksternal (Masyarakat)

1. Meningkatnya tata kelola yang ditandai dengan adanya ketertiban lingkungan Perairan dan ketenangan masyarakat baik pesisir pantai maupun Nelayan
2. Terjaminnya keamanan Nelayan Indonesia
3. Mewujudkan kepercayaan publik (trust building) dalam penegakan hukum di Wilayah Perairan
4. Meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan dan Pesisir Pantai

D. KAITAN ANTARA PROPER DENGAN RBT

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup penting dalam Kawasan maritim dunia, yang merupakan jalur penting dalam perdagangan dan transportasi laut dunia sehingga pemerintah menetapkan Tol laut sebagai bagian dari Fokus pembangunan nasional, terdapat fokus Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) yaitu mendukung terjadinya peningkatan investasi, dimana dalam strategi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan yang mendukung Indonesia untuk menjadi Tol Laut dan Poros Maritim Dunia, Iklim Investasi harus Kondusif. Inovasi Perubahan relevan dengan program Nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden.

E. RUANG LINGKUP

Proyek Perubahan ini merupakan peran penting Korpolairud Baharkam Polri Dalam menjaga harkamtibmas Wilayah Perairan ALKI yang sampai saat ini belum dilakukan kegiatan patrolinya secara khusus.

Kondisi Saat ini : Belum optimalnya peran Korpolairud dalam menjaga Harkamtibmas di Perairan ALKI

Locus : Korpolairud Baharkam Polri

Solusi : Analisis Kebijakan, Audiensi & FGD, Penyusunan SOP& Buku Panduan, Draft Kebijakan PerKaba, Patroli ALKI, Anggaran & SDM Patroli ALKI

Kondisi Yang Diharapkan : Peran Korpolairud dalam menjaga Harkamtibmas di Perairan ALKI Menjadi Optimal



F. OUTPUT & OUTCOME

Jangka Pendek

1. Terlaksananya analisis Kebijakan Dirpolair Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
2. Terlaksananya FGD dengan Stakeholder Untuk Penerbitan PerKaba
3. Terlaksananya Penyusunan Draft PerKaba Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
4. Terusunnya Standar Operational Prosedur & Buku Panduan Untuk Patroli Wilayah ALKI
5. Tersosialisasinya Draft Kebijakan PerKaba di Korpolaairud

Jangka Menengah :

1. Terlaksananya Sosialisasi Draft Kebijakan PerKaba di Ditpolairud yang dilalui ALKI Seluruh Indonesia
2. Terlaksananya Pengesahan PerKaba Tentang Pengamanan Wilayah ALKI
3. Tersusunnya Tambahan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan, Pengadaan Armada , Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI di Korpolaairud,
4. Terlaksananya Pengajuan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan ALKI, Pengadaan Armada , Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI ke Mabes Polri

Jangka Panjang :

1. Terlaksananya Pengadaan Kebutuhan Patroli Khusus Pengamanan, Armada, Sarana & Prasarana Untuk Patroli Perairan ALKI,
2. Terbitnya PKS antar Stakeholder di wilayah perairan ALKI untuk Sinergitas Pengamanan Perairan
3. Terimplementasikannya Patroli Wilayah Perairan di semua Wilayah ALKI Secara Keberlanjutan



G. TAHAPAN (MILESTONE)

JANGKA PENDEK

KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
A. Tahapan Perencanaan				
1. Rapat Awal Team Efektif 2. Rapat Pembahasan Anggaran	a. Pembentukan Team Efektif b. Pembagian Tugas c. Pembuatan Anggaran d. Pembahasan Alokasi & Sumber Dana	Sprin Team Efektif & anggaran Proper	M3 SEPT	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Staff Ditpolairud
B. Tahapan Pengorganisasian 1. Rapat Team Penjelasan Kinerja Team 2. Audiensi dengan Pimpinan Korpolaairud	a. Pengiriman undangan b. Rapat Team penjelasan kinerja Team dan target Jangka Pendek c. Pelaksanaan Audiensi dengan Pimpinan Korpolaairud	Pengarahan – Risalah Audiensi	M3 SEPT	a. Kakorpolaairud b. Dirpolair c. Kasubdit Ditpolairud d. Staff Ditpolairud
C. Tahapan Pelaksanaan				
1. Rapat Team Efektif Untuk Skema Efektivitas Pencapaian Proper	a. Pengiriman Undangan b. Rapat Strategy & Action Plan	Risalah Satrategi & Action Plan	M4 SEPT 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Staff Ditpolairud
2. Menganalisis Kebijakan Dirpolair tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI	a. Pengiriman Surat Undangan b. Analisis Kebijakan Dirpolair c. Rekomendasi	Rekomendasi Kebijakan	M4 SEPT 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Staff Ditpolairud
3. Melakukan FGD dengan Stakeholder Untuk Penerbitan Draft Perkaba	a. Pengiriman Surat Undangan b. Audiensi dengan Stakeholder c. FGD d. Risalah FGD	Risalah FGD	M1 OKT 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Staff Ditpolairud d. Pejabat KPLP e. Pejabat INSA

KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
4. Melakukan Penyusunan Draft Perkaba Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI	a. Penyusunan Draft Perkakor b. Pembahasan Draft perkakor c. Penerbitan Perkakor	Draft Perkaba Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI	M4 OKT 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Patroliair c. Tim efektif d. Staff Ditpolair
5. Penyusunan Standar Operational& Buku Panduan Prosedur Untuk Patroli Wilayah ALKI	a. Penyusunan Draft SOP & Buku Panduan b. Pembahasan & Pengesahan Draft SOP & Buku Panduan	SOP Pengamanan Wilayah Perairan ALKI & Buku Panduan	M1 NOP 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Patroliair c. Tim efektif d. Staff Ditpolair
6. Melaksanakan Sosialisasi Draft Kebijakan PerKaba di Lingkungan Kakorpolaairud	a. Pengiriman Surat Undangan b. Penyiapan Sarana & Prasarana c. Penyiapan materi Sosialisasi d. Pelaksanaan sosialisasi	Risalah Sosialisasi	M2 NOP 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Patroliair c. Tim efektif d. Staff Ditpolair
C. ANEV : Analisis Evaluasi & Monitoring	a. Pengiriman Surat Undangan b. Analisis Pencapaian Target c. Evaluasi	ANEV Proper	M3 NOP 2023	a. Dirpolair b. Kasubdit Patroliair c. Tim efektif d. Staff Ditpolair

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

JANGKA MENENGAH

KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Melaksanakan Sosialisasi Draft Kebijakan PerKaba di Ditpolairud yang dilalui ALKI Seluruh Indonesia	a. Pengiriman Surat Undangan b. Penyiapan Sarana & Prasarana c. Penyiapan materi Sosialisasi d. Pelaksanaan sosialisasi	Risalah Sosialisasi	JAN 2024	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Kasubag Ditpolairud d. Staff Ditpolairud e. Dirpolairud Polda Se-Indonesia
2. Melaksanakan Pengesahan PerKaba Tentang Pengamanan Wilayah ALKI	a. Pengiriman Surat Undangan b. Penyiapan Sarana & Prasarana c. Penyiapan materi Sosialisasi d. Pelaksanaan sosialisasi	PerKaba (Baharkam Polri)	JAN 2024	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Kasubag Ditpolairud d. Staff Ditpolairud e. Dirpolairud Polda Se-Jawa
3. Penyusunan Tambahan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan ALKI, Pengadaan Armada, Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI di Korpolaairud	a. Penyusunan Kebutuhan Armada, Sarana & Prasarana b. Alokasi anggaran c. Pengesahan Anggaran di Korpolaairud	Anggaran Patroli Perairan ALKI Korpolaairud	MAR 2024	a. Dirpolair b. Kasubdit Ditpolairud c. Kasubag Ditpolairud d. Kabag Logistik Ditpolairud e. Kabag Renmin Korpolaairud f. Staff Ditpolairud
4. Pengajuan Tambahan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan, Pengadaan Armada, Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI Ke Mabes Polri	a. Analisis Pengajuan Anggaran dari Korpolaairud b. Alokasi anggaran c. Pengesahan Anggaran Mabes Polri	Anggaran Patroli Perairan ALKI di Mabes Polri	JULI 2024	a. Srena Mabes Polri b. Kakorpolaairud c. Dirpolair d. Kabag Logistik Korpolaairud e. Kabag Renmin Korpolaairud f. Staff Ditpolairud

JANGKA PANJANG

KEGIATAN	TAHAPAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Pengadaan Kebutuhan Patroli Khusus Pengamanan, Armada, Sarana & Prasarana Untuk Patroli Perairan ALKI	a. Penerimaan Anggaran b. Proses Pembelian c. Delivery dan Ketersediaan Armada, Sarana & Prasarana	Armada, Sarana & Prasarana Dalam Pengamanan Perairan ALKI	OKTOBER 2024	a. Direktur Polairud b. Kasubdit Ditpolairud c. Kasubag Ditpolairud d. Kasubag Hukum Ditpolairud e. Staff Ditpolairud
2. PKS antar Stakeholder di wilayah perairan ALKI untuk Sinergitas Pengamanan Perairan	a. Pengiriman Surat Undangan b. Penyusunan Draft PKS c. Pembahasan Draft PKS d. Pengesahan PKS	PKS Sinergitas Stekeholder	DESEMBER 2023	a. Kakorpolaairud b. Kabag Kerma c. Dirpolair d. Staff Ditpolairud e. Kepala KPLP
3. Implementasi Patroli di semua Wilayah Perairan ALKI	a. Penyusunan Personil b. Pelatihan & Pembinaan Personil c. Proses Pelaksanaan patroli	Patroli Wilayah Perairan ALKI	JANUARI 2025	a. Kakorpolaairud b. Dirpolair c. Dirpolairud Seluruh Indonesia d. Staff Ditpolairud



II. IMPLEMENTASI TAHAPAN PROPER

Proyek Perubahan yang dilaksanakan khusus untuk Jangka pendek berhasil dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada tahapan RPP.

PERERENCANAAN : PEMBENTUKKAN TEAM EFEKTIF & PENGORGANISASIAN

18 September 2023

TUJUAN : Melakukan Pembentukan Team Efektif Untuk Membantu Project Leader

OUTPUT : Sprin Team Efektif

Pada tahap perencanaan & pengorganisasian dilakukan rapat untuk pembentukan team efektif, rapat ini juga menghasilkan sprint team efektif yang membantu Project Leader dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Gambar 2 : Rapat Awal Team Efektif



Rapat meneruskan untuk dibentuknya struktur team efektif.

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sp/1235/VIHUK.6.2/2023

Perimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran PKN TK II Angkatan XVIII Tahun 2023, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sp/1805/VIHUK.2.5.2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Penetapan Kepemimpinan Nasional (PKN).

DIPERINTAHKAN

Kepada: NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN TERSEBUT DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk:

1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan kegiatan sebagai Tim Efektif dalam rangka membantu Pelembagaan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2023 di Puskim, Bandung;
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Baharkam Polri;
4. melaksanakan

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 31 Agustus 2023

a.n. KEPALA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
KAGABRENMIN

Tembusan:

1. Kepala Pusat Baharkam Polri;
2. Danyon Korpolairud;
3. Kabagpennal dan TIK Korpolairud;
4. Kabagpennal Korpolairud;
5. Kasubagpennal Korpolairud.

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

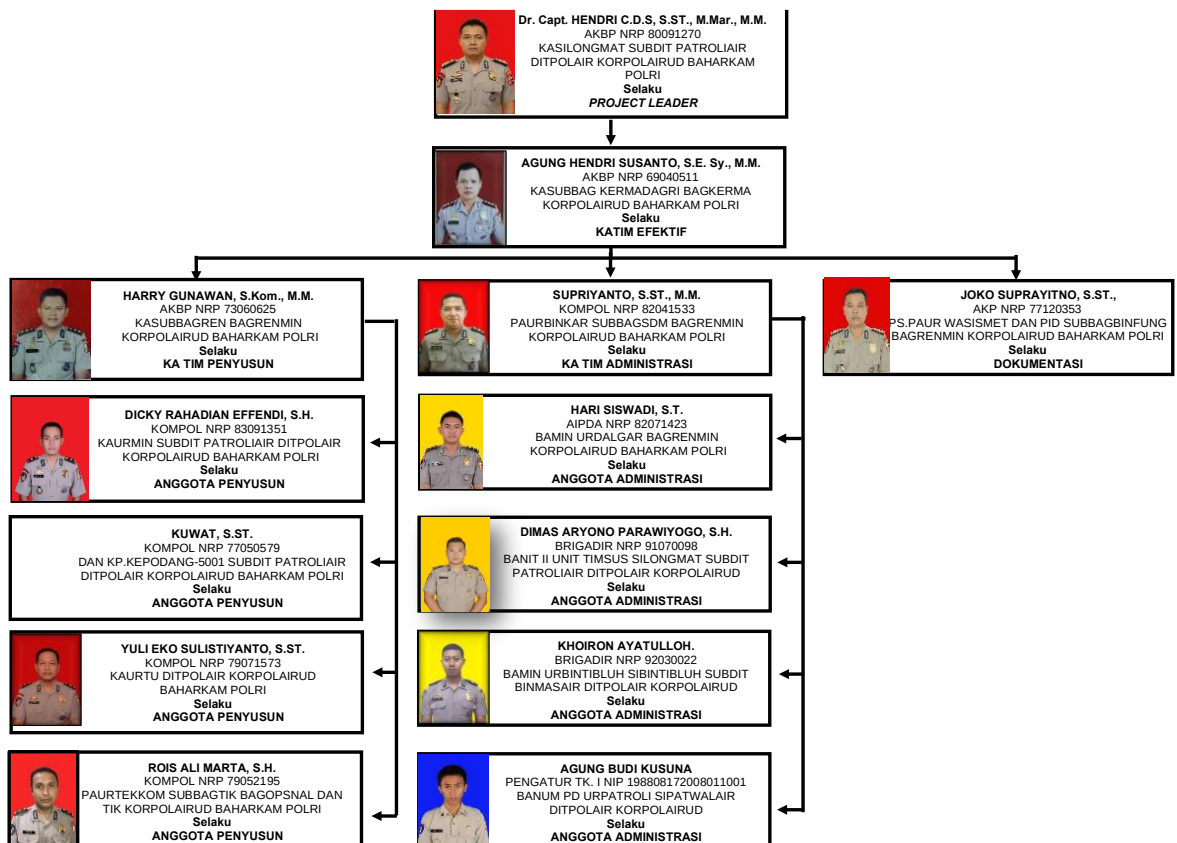
LAMPIRAN SURAT KEPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
NOMOR: Sp/1235/VIHUK.6.2/2023
TANGGAL: 31 Agustus 2023

DAFTAR NAMA PERSONEL KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI SEBAGAI TIM EFEKTIF PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1.	Dr. Capt. HENDRI C.D.S., S.ST., M.Mar., M.M.	AKBP 80091270	KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	PROJECT LEADER
2.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.E. Sy., M.M.	AKBP 69040511	KASUBBAG KERMADAGRI BAGKERMA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	KATIM EFEKTIF
3.	HARRY GUNAWAN, S.Kom., M.M.	AKBP 73060625	KASUBBAGREN BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
4.	DICKY RAHADIAN EFFENDI, S.H.	KOMPOL 83091351	KAURMIN SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
5.	KUWAT, S.ST.	KOMPOL 77050579	DAN KP.KEPODANG-5001 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
6.	YULI EKO SULISTIYANTO, S.ST.	KOMPOL 79071573	KAURTU DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
7.	ROIS ALI MARTA, S.H.	KOMPOL 79052195	PAURTEKKOM SUBBAGTIK BAGOPSNAL DAN TIK KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
8.	SUPRIYANTO, S.ST., M.M.	KOMPOL 82041533	PAURBINKOR SUBBAGSDM BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
9.	JOKO SUPRAYITNO, S.ST.,	AKP 77120353	PS. PAUR WASISMET DAN PID SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
10.	HARI SISWADI, S.T.	AIPDA 82071423	BAMIN URDALGAR SUBBAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
11.	KHOIRON AYATULLOH, S.T.	BRIGADIR 92030022	BAMIN URBINTILUH SIBINTILUH SUBDIT BINMASAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
12.	DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.	BRIGADIR 91070098	BANIT II UNIT TIMSUS SILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA

13. AGUNG BUDI KUSUNA

STRUKTUR TIM EFEKTIF DALAM RANGKA PKN II TINGKAT II ANGKATAN XVIII T.A.2023



RAPAT TEAM EFEKTIF UNTUK SKEMA EFEKTIVITAS PENCAPAIAN PROPER (1)

22 September 2023

TUJUAN : Melakukan Rapat Team Efektif Untuk Implementasi Proper & Efektifitas Pencapaian
OUTPUT : Risalah Strategi & Action Plan

Pada tahapan implementasi yang pertama yaitu melakukan rapat team yang bertujuan untuk pembagian tugas agar efektif dan efisien untuk pencapaian implementasi Proper.

Gambar 3 : Rapat Team Efektif Untuk Pembagian Tugas



Rapat menghasilkan Pembagian tugas untuk pencapaian Proper khususnya pada jangka pendek

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTULEN RAPAT TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

I. DASAR:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sp/1880/VI/DIRK.2.5/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
3. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VI/IRUK.6.6/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKGP Dr. Capt Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

II. PELAKSANAAN:

1. Rapat Tim Efektif dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:
hari : Jumat,
tanggal : 22 September 2023;
waktu : 08.00 Wib s.d. Selesai;
tempat : Ruang Rapat Subdit Baharkam Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri;
pimpinan : Kasubag Kema Dagri Bagkema Korpolairud Baharkam Polri selaku Ketua Tim Efektif
peserta : Tim Efektif
2. Pembahasan rapat:
a. Project Leader
1) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua dan Seluruh Tim Efektif yang hadir dalam kegiatan rapat awal;
2) Menjelaskan Tugas Tim Efektif;
3) Menjelaskan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Pencapaian dan Deadline Pelaksanaan;
4) Penugasan Tim Efektif menjadi 3 Sub Tim Efektif;
5) Diurungkan Output dari Project ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Korpolairud Baharkam Polri dan membangun sinergitas antara Stakeholder Maritim.
b. Ketua....
- b. Ketua Tim Efektif
1) Ucapan terima kasih kepada Project Leader telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada kami menjadi Ketua Tim Efektif, akan melaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapai dan terselesaikan tugas Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
2) Agar kepada seluruh Tim Efektif bekerja semaksimal mungkin untuk lancarnya proses penyusunan Produk Proyek Perubahan ini;
3) Pada rapat awal ini kami tekankan kepada Tim untuk dapat memahami Tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
4) Untuk mempermudah komunikasi kita buatkan WhatsApp Group dan selanjutnya untuk efektif dan efisien waktu penugasan dan pelaporan dapat dimonitor di WhatsApp Group.
- c. Anggota Tim Efektif
1) Terimakasih kepada Project Leader telah menunjuk kami menjadi Tim Efektif, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapai dan terselesaikan tugas secara efektif dan efisien.
2) Pada dasarnya kami siap membantu sesuai apa yang diperintahkan oleh Project Leader melalui Ketua Tim Efektif.

Mengetahui,
Kepala Subdit PATROLAIR DIRPOLAIR
Kepala Tim Efektif
DR. CAPT. HENDRI C.D.S., S.ST., M.Mar., M.M.
AJUN KOMSARIS BESAR POLISI NRP 80091270

BANIT II UNIT TIMSUS SILONGMAT
Setahu
NOTULEN
DIMAS ARYON PRADITYO, S.H.
BRIGADIR POLISI NRP 91070098

ANALISIS KEBIJAKAN DIRPOLAIR TENTANG PENGAMANAN WILAYAH PERAIRAN ALKI (2)

24 September 2023

TUJUAN : Melakukan Analisis Kebijakan Dirpolair Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
OUTPUT : Risalah Strategi & Action Plan

Pada Aktivitas yang kedua yaitu melakukan analisis terhadap peraturan yang berlaku tentang pengamanan Wilayah perairan ALKI yaitu peraturan Dirpolair Baharkam Polri No.01 Tahun 2016.



Gambar 4 : Rapat Analisis Kebijakan



Rapat Analisis menghasilkan Risalah Strategi dan Action Plan dalam Perubahan Perkaba, SOP serta buku Panduan.

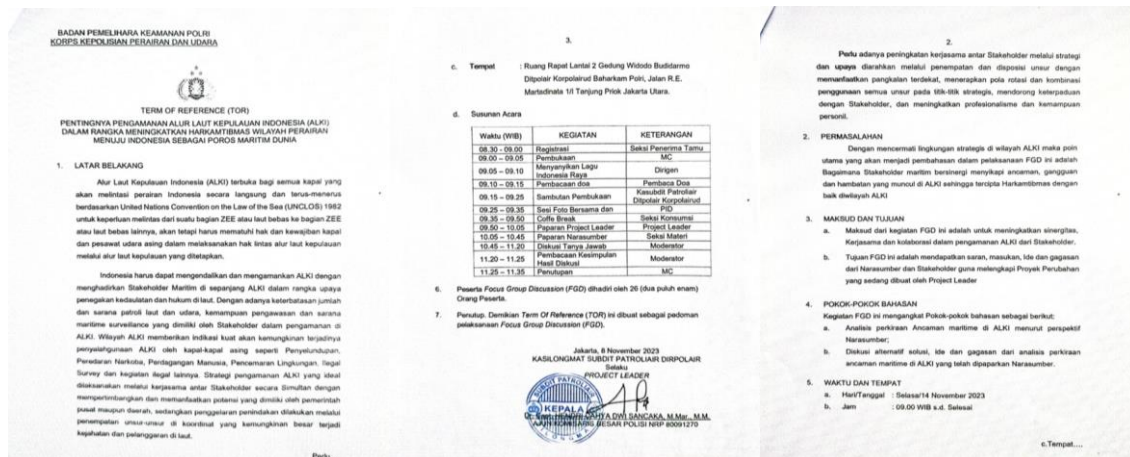
22

FGD DENGAN STAKEHOLDER UNTUK PENERBITAN PERKABA (3)

02 Oktober 2023

TUJUAN : Melakukan FGD Dengan Stakeholder untuk Penerbitan Draft Perkaba Dalam Pegamanan Wilayah ALKI
OUTPUT : Risalah FGD

Pada aktivitas ketiga dari implementasi jangka pendek yaitu melakukan focus group discussion untuk mendapatkan masukan dalam penerbitan Perkaba untuk Strategi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sebelum pelaksanaan FGD terlebih dahulu diterbitkan TOR FGD untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan FGD.



Gambar 5 : FGD Pengamanan Wilayah ALKI



STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

Setelah pelaksanaan FGD dilakukan juga sosialisasi melalui media elektronik :



FGD juga menghasilkan Risalah yang menjadi masukan dalam Strategi Pengamanan ALKI.

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DIBIDKORBAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTULA FOCUS GROUP DISCUSSION PATROLI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA PELATIHAN KEPERIMPINAN NASIONAL TINGKAT I (ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023)

I. DASAR

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SP/180/18/2023 tanggal 29 Juli 2023 perihal 'Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)'.
3. Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri Nomor: 305/VI/18/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Petunjuk Tim Efektif dalam rangka membantu AKSP Di Cakupan Cakupan Di Saraka, S.T., M.M., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXVIII Tahun 2023.

II. PELAKSANAAN

1. Rapat Tim Efektif dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari : Selasa tanggal : 14 November 2023 pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai. Ruang Rapat gelang Dapodik lantai 2 Korpolairud Baharkam Polri tempat peserta : KPULP KELAS 1 TANJUNG PRICK, KESYAHBANDARAN UTAMA KELAS 1 TANJUNG PRICK, PISOP JAKARTTA, SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TANJUNG PRICK DAN PARAKOMANDERA KAPAL PANGKALAN.
2. Pembahasan rapat:
 - a. Kala sambutan oleh kasubdit gakkum kombespol I Wayan Suparta Yadja S.I.K dan sebagai pembuka acara pada pukul 08.00 wib. Pada kesempatan ini Wilayah Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan patroli memiliki 73 armada kapal dan 1 armada kapal yang besar yang berfungsi untuk pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) Indonesia.
 - b. Pembahasan oleh moderator Dr. Capt. Marcelus Jayawabawa S.ST.M.Mir tentang strategi korpolairud baharkam Polri pada pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dalam rangka meningkatkan harkamtibmas wilayah perairan. Wilayah diperjuangkan dengan urfuf yang hasil pemikir bangsa Indonesia.

2. Angkutan Laut bukan digusikan untuk rakyat sipil namun yang digusikan untuk rakyat sipil adalah polisi dan Indonesia memiliki 17.450 pulau ya karena Indonesia merupakan merupakan negara maritim. Bagi negara maritim seperti Indonesia yang jika digusikan dengan ladanya yang sangat luas.

Dari Indonesia memiliki 3 alur laut dan sebenarnya ini bisa meningkatkan ekonomi Indonesia karena dalam setahun bisa 40.000 kapal asing yang melintas oleh maka itu sebenarnya kita ini membangun rest area atau dari pulau-pulau. Kalau yang ini bisa diandalkan ya kita ini melakukan keadaaan kapal-kapal yang melintas dan kita sebenarnya kerja sama dengan pihak lain yang bisa membantu kita seperti contoh : pulau-pulau mempunyai 1 kapal besar dan bisa juga mempunyai 1 kapal besar oleh karena itu kapal besar yang berwujud di satu titik bisa setiap bulan jenuh kapal laut yang diangkut dan bisa juga membantu ke wilayah lain dan juga pun sebenarnya yang berfungsi supaya dapat memaksimalkan pengamanan wilayah laut Indonesia.

Alur laut dibuang, natura, saat maka dan lain-lain sebenarnya bisa memaksimalkan perikanan 1.400 triliun dan untuk mengelola wilayah maritim semaksimal mungkin untuk membangun ekonomi bangsa yang lebih baik.

Mengatakan hukum ini masih sangat problematis dan dilematis karena wilayah alur laut kita ini tidak semaksimal mungkin dikelola.

Kesimpulan saya adalah meningkatkan kesadaran Masyarakat karena Indonesia ini adalah negara maritim dan potensi dan ini dapat bekerja sama untuk membangun wilayah maritim Indonesia.

c. Saran/tanggapan dari peserta

- 1) Bas cakra : Inspektur karnibmas kami berkaitan dengan fungsi dan kita mempunyai 3 alur laut oleh karena itu kita harus melakukan pengamanan di wilayah Indonesia. Jadi setiap barang yang melewati perbatasan Indonesia itu dihitung sebagai hutang dan harus dibayar kepada Indonesia dan ketika suatu barang dibongkar di tempat yang tidak resmi maka itu disebut penyelundupan dan kita harus membangun komunikasi antara bas cakra, ini Angkatan laut, kapal dan polisi untuk yang bisa membantu dari pada kita masing-masing bertugas menjaga harkamtibmas yang lebih luas jika komunikasi dan koordinasi ini berjalan dan maka kita sama-sama menjaga wilayah laut Indonesia.
- 2) KOP : kami sangat mendukung stakeholder maritim Indonesia dan kita bisa melakukan latihan gabungan untuk menjaga wilayah alur laut Indonesia.
- 3) KOP : menurut UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan diperkuat oleh UU cipta kerja, kami bisa mengorganisir kasa tentang pengamanan pasai laut yang dimana telah mengorganisir orang-orang laut wilayah laut Indonesia yang mana mengutamakan pihak individu dan kami melakukan pengamanan di 4 wilayah lumpur, jawa barat 200 pulau, banten kami mengawasi hewan yang dibuang dan kami menjaga

3. juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui sms gate way dan kami juga dapat memantau data hasil observasi dan kami juga melakukan pengamanan ruang laut yang tidak sesuai dan kami juga mau melakukan integrasi dengan polisi tentang pengamanan data perikanan di wilayah laut Indonesia.



BANTU UNIT TIMSUS SLOKMAT
Setelah
Nuzul
Dinas
BRIGADIR PULSI NIP 9107009

RISALAH FGD

PENYUSUNAN DRAFT PERKABA (4)

23 Oktober 2023

TUJUAN : Melakukan Penyusunan Draft Perkaba Tentang Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
OUTPUT : Draft Perkaba

Aktivitas selanjutnya yaitu melakukan penyusunan draft perkaba Baharkam Polri tentang Pengamanan Wilayah perairan ALKI.

Gambar 6 : Rapat Penyusunan Draft Perkaba



Rapat penyusunan menghasilkan Draft Perkaba bagi Pengamanan Wikayah ALKI yang nanti akan terus dilanjutkan pada Jangka Menengah untuk proses pengesahannya.

- 2 -

- 3 -

- 5 -

Panel 1

Panel 2

Panel 3

Panel 4

Panel 5

Panel 6

Panel 7

Panel 8

Panel 9

Panel 10

Panel 11

Panel 12

Panel 13

Panel 14

Panel 15

Panel 16

Panel 17

Panel 18

Panel 19

Panel 20

Panel 21

Panel 22

Panel 23

Panel 24

Panel 25

Panel 26

Panel 27

Panel 28

Panel 29

Panel 30

Panel 31

Panel 32

Panel 33

Panel 34

Panel 35

Panel 36

Panel 37

Panel 38

Panel 39

Panel 40

Panel 41

Panel 42

Panel 43

Panel 44

Panel 45

Panel 46

Panel 47

Panel 48

Panel 49

Panel 50

Panel 51

Panel 52

Panel 53

Panel 54

Panel 55

Panel 56

Panel 57

Panel 58

Panel 59

Panel 60

Panel 61

Panel 62

Panel 63

Panel 64

Panel 65

Panel 66

Panel 67

Panel 68

Panel 69

Panel 70

Panel 71

Panel 72

Panel 73

Panel 74

Panel 75

Panel 76

Panel 77

Panel 78

Panel 79

Panel 80

Panel 81

Panel 82

Panel 83

Panel 84

Panel 85

Panel 86

Panel 87

Panel 88

Panel 89

Panel 90

Panel 91

Panel 92

Panel 93

Panel 94

Panel 95

Panel 96

Panel 97

Panel 98

Panel 99

Panel 100

Panel 101

Panel 102

Panel 103

Panel 104

Panel 105

Panel 106

Panel 107

Panel 108

Panel 109

Panel 110

Panel 111

Panel 112

Panel 113

Panel 114

Panel 115

Panel 116

Panel 117

Panel 118

Panel 119

Panel 120

Panel 121

Panel 122

Panel 123

Panel 124

Panel 125

Panel 126

Panel 127

Panel 128

Panel 129

Panel 130

Panel 131

Panel 132

Panel 133

Panel 134

Panel 135

Panel 136

Panel 137

Panel 138

Panel 139

Panel 140

Panel 141

Panel 142

Panel 143

Panel 144

Panel 145

Panel 146

Panel 147

Panel 148

Panel 149

Panel 150

Panel 151

Panel 152

Panel 153

Panel 154

Panel 155

Panel 156

Panel 157

Panel 158

Panel 159

Panel 160

Panel 161

Panel 162

Panel 163

Panel 164

Panel 165

Panel 166

Panel 167

Panel 168

Panel 169

Panel 170

Panel 171

Panel 172

Panel 173

Panel 174

Panel 175

Panel 176

Panel 177

Panel 178

Panel 179

Panel 180

Panel 181

Panel 182

Panel 183

Panel 184

Panel 185

Panel 186

Panel 187

Panel 188

Panel 189

Panel 190

Panel 191

Panel 192

Panel 193

Panel 194

Panel 195

Panel 196

Panel 197

Panel 198

Panel 199

Panel 200

Panel 201

Panel 202

Panel 203

Panel 204

Panel 205

Panel 206

Panel 207

Panel 208

Panel 209

Panel 210

Panel 211

Panel 212

Panel 213

Panel 214

Panel 215

Panel 216

Panel 217

Panel 218

Panel 219

Panel 220

Panel 221

Panel 222

Panel 223

Panel 224

Panel 225

Panel 226

Panel 227

Panel 228

Panel 229

Panel 230

Panel 231

Panel 232

Panel 233

Panel 234

Panel 235

Panel 236

Panel 237

Panel 238

Panel 239

Panel 240

Panel 241

Panel 242

Panel 243

Panel 244

Panel 245

Panel 246

Panel 247

Panel 248

Panel 249

Panel 250

Panel 251

Panel 252

Panel 253

Panel 254

Panel 255

Panel 256

Panel 257

Panel 258

Panel 259

Panel 260

Panel 261

Panel 262

Panel 263

Panel 264

Panel 265

Panel 266

Panel 267

Panel 268

Panel 269

Panel 270

Panel 271

Panel 272

Panel 273

Panel 274

Panel 275

Panel 276

Panel 277

Panel 278

Panel 279

Panel 280

Panel 281

Panel 282

Panel 283

Panel 284

Panel 285

Panel 286

Panel 287

Panel 288

Panel 289

Panel 290

Panel 291

Panel 292

Panel 293

Panel 294

Panel 295

Panel 296

Panel 297

Panel 298

Panel 299

Panel 300

Panel 301

Panel 302

Panel 303

Panel 304

Panel 305

Panel 306

Panel 307

Panel 308

Panel 309

Panel 310

Panel 311

Panel 312

Panel 313

Panel 314

Panel 315

Panel 316

Panel 317

Panel 318

Panel 319

Panel 320

Panel 321

Panel 322

Panel 323

Panel 324

Panel 325

Panel 326

Panel 327

Panel 328

Panel 329

Panel 330

Panel 331

Panel 332

Panel 333

Panel 334

Panel 335

Panel 336

Panel 337

Panel 338

Panel 339

Panel 340

Panel 341

Panel 342

Panel 343

Panel 344

Panel 345

Panel 346

Panel 347

Panel 348

Panel 349

Panel 350

Panel 351

Panel 352

Panel 353

Panel 354

Panel 355

Panel 356

Panel 357

Panel 358

Panel 359

Panel 360

Panel 361

Panel 362

Panel 363

Panel 364

Panel 365

Panel 366

Panel 367

Panel 368

Panel 369

Panel 370

Panel 371

Panel 372

Panel 373

Panel 374

Panel 375

Panel 376

Panel 377

Panel 378

Panel 379

Panel 380

Panel 381

Panel 382

Panel 383

Panel 384

Panel 385

Panel 386

Panel 387

Panel 388

Panel 389

Panel 390

Panel 391

Panel 392

Panel 393

Panel 394

Panel 395

Panel 396

Panel 397

Panel 398

Panel 399

Panel 400

Panel 401

Panel 402

Panel 403

Panel 404

Panel 405

Panel 406

Panel 407

Panel 408

Panel 409

Panel 410

Panel 411

Panel 412

Panel 413

Panel 414

Panel 415

Panel 416

Panel 417

Panel 418

Panel 419

Panel 420

Panel 421

Panel 422

Panel 423

Panel 424

Panel 425

Panel 426

Panel 427

Panel 428

Panel 429

Panel 430

Panel 431

Panel 432

Panel 433

Panel 434

Panel 435

Panel 436

Panel 437

Panel 438

Panel 439

Panel 440

Panel 441

Panel 442

Panel 443

Panel 444

Panel 445

Panel 446

Panel 447

Panel 448

Panel 449

Panel 450

Panel 451

Panel 452

Panel 453

Panel 454

Panel 455

Panel 456

Panel 457

Panel 458

Panel 459

Panel 460

Panel 461

Panel 462

Panel 463

Panel 464

Panel 465

Panel 466

Panel 467

Panel 468

Panel 469

Panel 470

Panel 471

Panel 472

Panel 473

Panel 474

Panel 475

Panel 476

Panel 477

Panel 478

Panel 479

Panel 480

Panel 481

Panel 482

Panel 483

Panel 484

Panel 485

Panel 486

Panel 487

Panel 488

Panel 489

Panel 490

Panel 491

Panel 492

Panel 493

Panel 494

Panel 495

Panel 496

Panel 497

Panel 498

Panel 499

Panel 500

Panel 501

Panel 502

Panel 503

Panel 504

Panel 505

Panel 506

Panel 507

Panel 508

Panel 509

Panel 510

Panel 511

Panel 512

Panel 513

Panel 514

Panel 515

Panel 516

Panel 517

Panel 518

Panel 519

Panel 520

Panel 521

Panel 522

Panel 523

Panel 524

Panel 525

Panel 526

Panel 527

Panel 528

Panel 529

Panel 530

Panel 531

Panel 532

Panel 533

Panel 534

Panel 535

Panel 536

Panel 537

Panel 538

Panel 539

Panel 540

Panel 541

Panel 542

Panel 543

Panel 544

Panel 545

Panel 546

Panel 547

Panel 548

Panel 549

Panel 550

Panel 551

Panel 552

Panel 553

Panel 554

Panel 555

Panel 556

Panel 557

Panel 558

Panel 559

Panel 560

Panel 561

Panel 562

Panel 563

Panel 564

Panel 565

Panel 566

Panel 567

Panel 568

Panel 569

Panel 570

Panel 571

Panel 572

Panel 573

Panel 574

Panel 575

Panel 576

Panel 577

Panel 578

Panel 579

Panel 580

Panel 581

Panel 582

Panel 583

Panel 584

Panel 585

Panel 586

Panel 587

Panel 588

Panel 589

Panel 590

Panel 591

Panel 592

Panel 593

Panel 594

Panel 595

Panel 596

Panel 597

Panel 598

Panel 599

Panel 600

Panel 601

Panel 602

Panel 603

Panel 604

Panel 605

Panel 606

Panel 607

Panel 608

Panel 609

Panel 610

Panel 611

Panel 612

Panel 613

Panel 614

Panel 615

Panel 616

Panel 617

Panel 618

Panel 619

Panel 620

Panel 621

Panel 622

Panel 623

Panel 624

Panel 625

Panel 626

Panel 627

Panel 628

Panel 629

Panel 630

Panel 631

Panel 632

Panel 633

Panel 634

Panel 635

Panel 636

Panel 637

Panel 638

Panel 639

Panel 640

Panel 641

Panel 642

Panel 643

Panel 644

Panel 645

Panel 646

Panel 647

Panel 648

Panel 649

Panel 650

Panel 651

Panel 652

Panel 653

Panel 654

Panel 655

Panel 656

Panel 657

Panel 658

Panel 659

Panel 660

Panel 661

Panel 662

Panel 663

Panel 664

Panel 665

Panel 666

Panel 667

Panel 668

Panel 669

Panel 670

Panel 671

Panel 672

Panel 673

Panel 674

Panel 675

Panel 676

Panel 677

Panel 678

Panel 679

Panel 680

Panel 681

Panel 682

Panel 683

Panel 684

Panel 685

Panel 686

Panel 687

Panel 688

Panel 689

Panel 690

Panel 691

Panel 692

Panel 693

Panel 694

Panel 695

Panel 696

Panel 697

Panel 698

Panel 699

Panel 700

Panel 701

Panel 702

Panel 703

Panel 704

Panel 705

Panel 706

Panel 707

Panel 708

Panel 709

Panel 710

Panel 711

Panel 712

Panel 713

Panel 714

Panel 715

Panel 716

Panel 717

Panel 718

Panel 719

Panel 720

Panel 721

Panel 722

Panel 723

Panel 724

Panel 725

Panel 726

Panel 727

Panel 728

Panel 729

Panel 730

Panel 731

Panel 732

Panel 733

Panel 734

Panel 735

Panel 736

Panel 737

Panel 738

Panel 739

Panel 740

Panel 741

Panel 742

Panel 743

Panel 744

Panel 745

Panel 746

Panel 747

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
PATROLI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)
SATKER KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
SUMBER PEMBIAYAAN APBN T.A. 2023**

Jakarta, November 2023

4

6. Alat dan personel dalam pelaksanaan patroli perairan melibatkan 6 (enam) unit Kapal Patrol dan 150 personel sebagai berikut:

- 2 unit Kapal Patrol Klas A2 dengan 54 Personel;
- 2 unit Kapal Patrol Klas A3 dengan 56 Personel;
- 2 unit Kapal Patrol Klas B2 dengan 48 Personel.

B. FENOMENA MANFAAT
Fenomena manfaat kegiatan dimaksud adalah Negara Indonesia serta masyarakat Indonesia.

C. MANFAAT DARI KEGIATAN

- Menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia;
- Agar dapat menegakkan hukum di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terhadap pelaku pelanggaran dan tindak pidana, menjaga keamanan negara;
- sebagai pelaksanaan tugas operasional Kepolisian Perairan dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat serta dalam menegakkan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Nasional Indonesia.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Capaian keluaran patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mulai Januari s.d. Desember Tahun Anggaran 2023

E. BIAYA YANG DIBUTUHKAN
Kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 58.956.777.780, (enam puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan penjelasan RAB Terlampir.

F. PENUTUP
Demikian Term Of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) patroli perairan Indonesia dibuat dengan harapan dapat dijadikan bahan, guna mengambil kebijaksanaan dan keputusan lebih lanjut.

Paraf:

1. Konseptor/Kabid Patroli Jakarta, November 2023
KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

2. Disiplin
Dit. INDIRA MUZA, M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLIS

3. Kabagennin
Dit. INDIRA MUZA, M.Si
INSPEKTUR JENDERAL POLIS

4. Katsid

DRAFT PERKABA

Draft Perkaba Detail terdapat pada lampiran.

SOSIALISASI DRAFT KEBIJAKAN PERKABA DI LINGKUNGAN KORPOLAIRUD(6)

08 Nopember 2023

TUJUAN : Melakukan Sosialisasi Draft Kebijakan Perkaba di Lingkungan Korpolaairud Baharkam Polri
OUTPUT : Hasil sosialisasi

Sosialisasi dilakukan baik untuk draft perkaba maupun sosialisasi tentang panduan pengamanan Wilayah ALKI yang didalamnya juga memuat Standar Operasional prosedur



Gambar 8 : Sosialisasi di Kapal Ditpolair & Korpolaairud



ANEV

Tahap akhir setelah implementasi dilakukan , maka team efektif bersama Project Leader melakukan rapat Analisis dan Evaluasi untuk penyusunan laporan dan mengevaluasi secara keseluruhan dari implementasi Proper untuk menjadi Lesson & Learnt.



III. IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Pada proyek perubahan ini adalah menjawab berbagai sissue strategi dalam pengamanan wilayah ALKI yang berhasi di implementasikan, implementasi kepemimpinan Atrtageis tersebut adalah sebagai berikut :



SOSIALISASI PENGAMANAN ALKI UNTUK MENJAGA HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN



FGD UNTUK FORMULASI STRATEGI PENGAMANAN ALKI





***MENGANALISIS PERATURAN & DRAFT PERKABA UNTUK STRATEGI
PENGAMANAN ALKI***



MENERBITKAN BUKU PANDUAN UNTUK PATROLI PAM ALKI

IV. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

a. Pemetaan Stakeholder & Strategi Komunikasi

Stakeholder yg terlibat dalam proyek perubahan ini dapat dibagi dalam:

Stakeholder Internal :

- 1 Kakorpolairud
- 2 Dirpolair Korpolairud
- 3 Kasubdit Patroliair
- 4 Kabag pada Korpolairud
- 5 Srena Mabes Polri
- 6 Dirpolairud Polda Seluruh Indonesia
- 7 Para Komandan Kapal Patroli Polisi

Stakeholder Eksternal :

- 1 Pimpinan KKP
- 2 Pimpinan INSA
- 3 Pimpinan KPLP
- 4 Pimpinan Bakamla
- 5 Media Massa
- 6 LSM
- 7 Pimpinan Basarnas
- 8 Praktisi Kebijakan Wilayah Perairan
9. Masyarakat Maritim

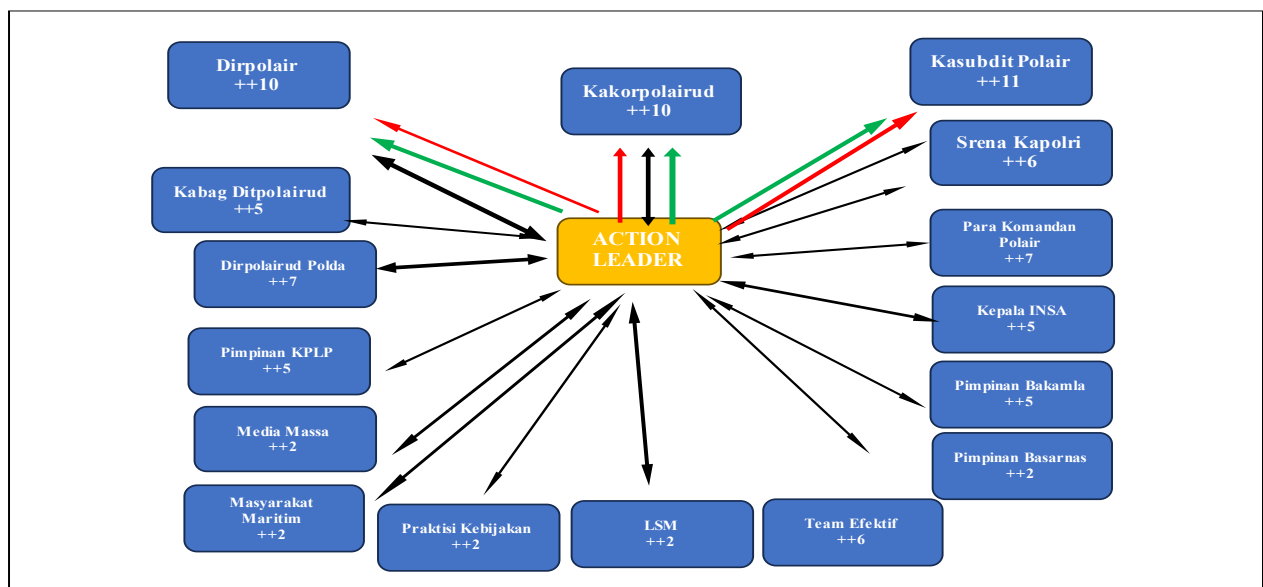


STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

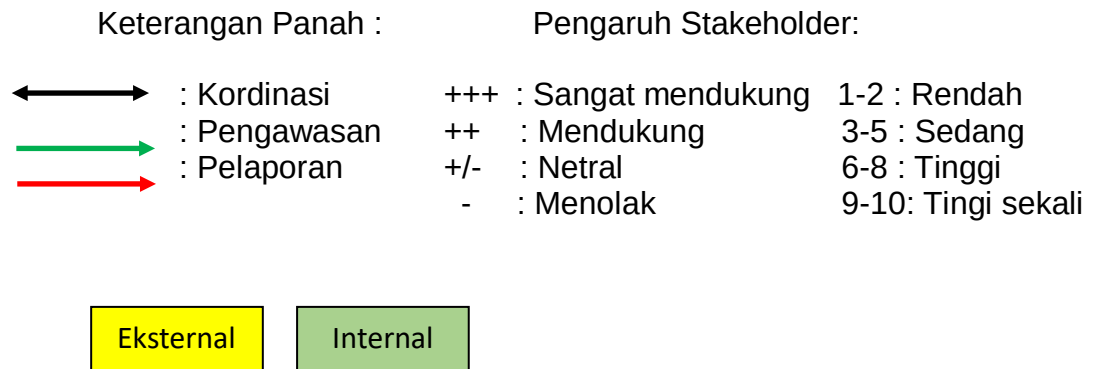
Tabel 2 : Identifikasi Stakeholder

NO	STAKE HOLDER	STRATEGI KOMUNIKASI	DUKUNGAN/ PENGARUH	ANALISA STAKE HOLDER	JENIS STAKE HOLDER
A. STAKEHOLDER INTERNAL					
1	Kakorpolaairud	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++10	Promoter	Utama
2	Dirpolair Korpoairud	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++10	Promoter	Utama
3	Kasubdit Patroliair	Audiensi, Laporan & Konsultasi	+10	Promoter	Utama
4	Kabag Korpolaairud	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
5	Srena Kapolri	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++6	Latent	Sekunder
6	Para Komandan Kapal	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi	++7	Defender	Primer
6	Dirpolairud Polda Seluruh Indonesia	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi	++7	Latent	Sekunder
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL					
1	Kepala INSA	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
2	Pimpinan KPLP	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
3	Pimpinan KKP	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi	++5	Latent	Sekunder
4	Pimpinan Bakamla	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++5	Latent	Sekunder
5	Media Massa	Sosialisasi	++2	Apathetic	Primer
6	LSM	Sosialisasi	++2	Apathetic	Primer
7	Pimpinan Basarnas	Audiensi, Laporan & Konsultasi	++2		Primer
8	Praktisi Kebijakan Wilayah Perairan	Koordinasi & Sosialisasi	++2	Apathetic	Primer
9	Masyarakat Maritim	Sosialisasi	++2	Apathetic	Primer

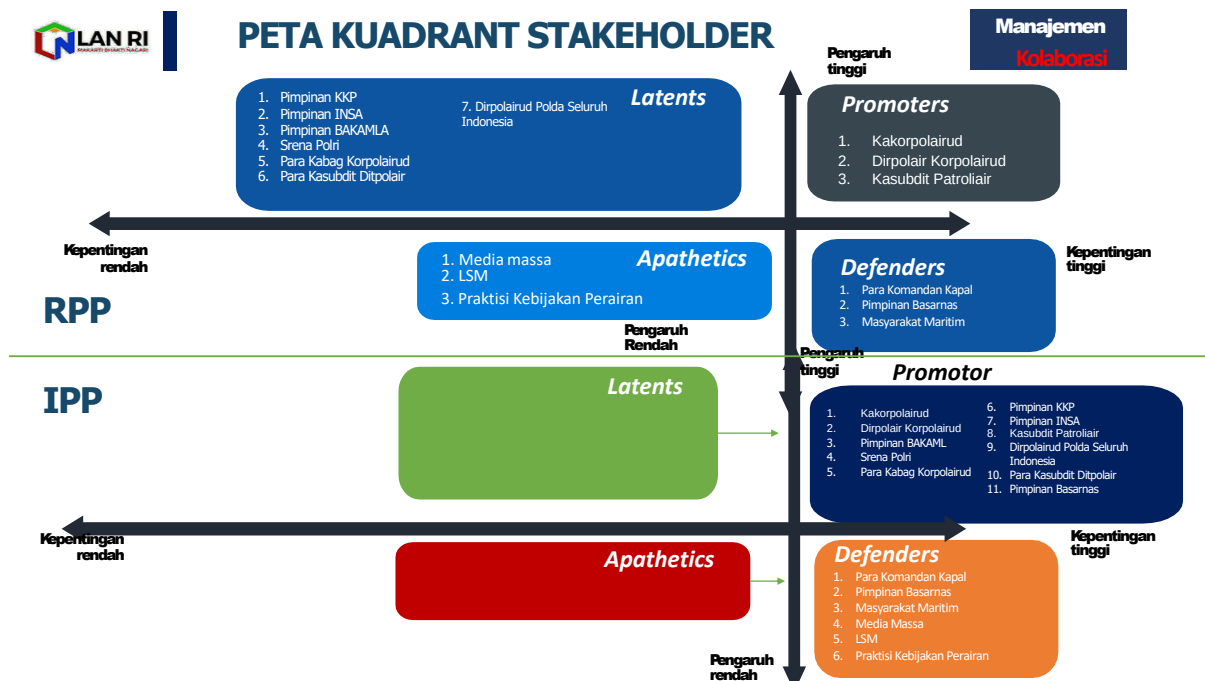
Gambar 9 : Pemetaan Stakeholder



STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN



Gambar 10 : Pemetaan Kuad rant Stakeholder Setelah IPP



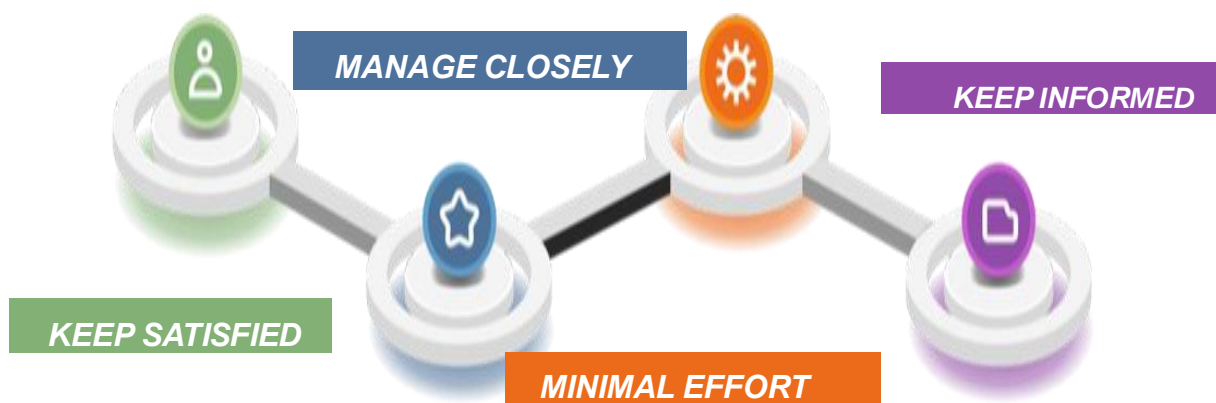
Berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Stakeholder Promoters, yaitu stakeholder/orang-orang yang harus benar-benar dilibatkan dan yang membawa pengaruh terbesar dalam proyek perubahan;
2. Stakeholder Latent, yaitu stakeholder/orang-orang dengan pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah. Stakeholders ini bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan;
3. Stakeholder Defenders, yaitu stakeholder/orang-orang yang memiliki ketertarikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan yang kecil. khususnya dalam komunikasi;

4. Stakeholder Apathetics, yaitu stakehoders/orang-orang yang pengaruh rendah dan kepentingan rendah, mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholder secara kebetulan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan stakeholder selanjutnya dilakukan strategi dengan tujuan strategi yang masih memiliki pengaruh rendah atau kepentingan rendah bisa ditarik pada kuadran yang tinggi pengaruh dan kepentingannya. Untuk itu, peta strategi komunikasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Gambar 11 : Strategi Mempengaruhi Stakeholder



Strategi komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kuadran Stakeholder masing- masing, untuk Stakeholder pada kuadran *Promoters*, strategi yang digunakan adalah *manage closely* yaitu kelompok stakeholder yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan dukungan dan minat promoters terhadap proyek perubahan:

- Konsultasi secara reguler;
- Pelaporan secara reguler;
- Diskusi secara reguler;
- Memberikan arahan dan bimbingan teknis; dan
- Memantau progres kegiatan dan mengidentifikasi hambatan terhadap proyek perubahan.

Kemudian untuk Stakeholder pada kuadran *Defender* strategi yang digunakan adalah *Keep Informed* , Stakeholder ini terpengaruh oleh proyek perubahan namun tidak memberi dampak besar pada proyek perubahan Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek perubahan yaitu dengan konsultasi dan sosialisasi tentang Strategi Korpolaairud Baharkam Polri Dalam pengamanan ALKI Untuk meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan. Kuadran *Latent* strategi komunikasi yang digunakan adalah *Keep Satisfied* dimana stakeholder ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh stakeholders agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan konsultasi yang reguler, sedangkan pada kuadran *Apathetic* yang digunakan strategi *minimal effort* dimana Stakeholder ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif terlibat dalam proyek perubahan, Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan dukungan stakeholders agar mendukung proyek perubahan yaitu dengan, saling memberikan masukan dan berbagi pengalaman dengan koordinasi, kolaborasi, edukasi dan konsultasi.

Komunikasi Yang dilakukan Dengan Stakeholder



STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

Tabel 3: Detail Strategi Komunikasi Dengan Stakeholder

NO	STAKE HOLDER	EKSPEKTASI	STRATEGI KOMUNIKASI
A. STAKEHOLDER INTERNAL			
1	Kakorpolairud	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
2	Dirpolair Korpoairud	Mengarahkan & Memberikan Dukungan Serta Menyetujui Proper	Audiensi, Laporan & Konsultasi
3	Kasubdit Patroliair	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
4	Kabag Ditpolairud	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
5	Srena Polri	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi, Laporan & Konsultasi
6	Para Komandan Patroliair	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
6	Dirpolairud Polda Seluruh Indonesia	Mengarahkan & Memberikan Dukungan	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
B. STAKEHOLDER EKSTERNAL			
1	Kepala INSA	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
2	Pimpinan KPLP	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
3	Pimpinan KKP	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi & Koordinasi & Sosialisasi
4	Pimpinan Bakamla	Komitmen Bersama & Kolaborasi	Audiensi, Laporan & Konsultasi
5	Media Massa	Mendukung Proper	Sosialisasi
6	LSM	Mendukung Proper	Sosialisasi
7	Pimpinan Basarnas	Mendukung Proper	Audiensi, Laporan & Konsultasi
8	Praktisi Kebijakan Wilayah Perairan	Mendukung Proper	Koordinasi & Sosialisasi
9	Masyarakat Maritim	Mendukung Proper	Sosialisasi

Strategi komunikasi yang berhasil dilaksanakan menghasilkan dukungan dari Stakeholder melalui surat dukungan yang telah diberikan.

SURAT DUKUNGAN STAKEHOLDER



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya yang berlandaskan di bawah ini:

Nama : TRIONO, S.Pel., M.M.
Jabatan : KA PANGKALAN KPLP TANJUNG PRIOK.

Dengan ini menyatakan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul: "STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN" yang dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : AKBP Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR
Kesatuan : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI;
NDH : 08.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 08 Oktober 2023
KA PANGKALAN KPLP TANJUNG PRIOK

TRIONO, S.Pel., M.M.

KEPALAKPLPTJPRIOK

HENDRI CAHYA DWI SANCAKA-NDH-08



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya yang berlandaskan di bawah ini:

Nama : Saiful Umam, S.St.PI
NIP : 19620920 200502 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.IV/B
Jabatan : Ketua Tim Perawatan dan Pemeliharaan Sarana, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dengan ini menyatakan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul: "STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN" yang dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : AKBP Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR
Kesatuan : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
NDH : 08

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 25 November 2023

Saiful Umam, S.St.PI

**KETUA TIM PERAWATAN &
PEMELIHARAAN SARANA,
DIREKTORAT PEMANTAUAN &
OPERASI ARMADA KKP**

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Capt. HENDRI GINTING, M.M.
NIP : 197410311998081001
Jabatan : DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT.

Dengan ini menyatakan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul: "STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN" yang dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : AKBP Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.;
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR;
Kesatuan : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI;
NDH : 08.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, November 2023
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Capt. HENDRI GINTING, M.M.
NIP. 197410311998081001

DIREKTUR LALU LINTAS & ANGKUTAN LAUT



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KOMISARIS BESAR POLISI JOKO SADONO, S.H., M.H., M.Han.;
Jabatan : DIRPOLAIRUD POLDA METRO JAYA.

Dengan ini menyatakan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul: "STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN" yang dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : AKBP Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR
Kesatuan : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
NDH : 08

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, November 2023
DIRPOLAIRUD POLDA METRO JAYA

JOKO SADONO, S.H., M.H., M.Han.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73040552

DIRPOLAIRUD POLDA METRO



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADI SUGIRI;
Jabatan : EXECUTIVE GENERAL MANAGER PT. PELINDO REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK.

Dengan ini menyatakan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul: "STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN" yang dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : AKBP Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR
Kesatuan : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
NDH : 08

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, November 2023
EXECUTIVE GENERAL MANAGER
PT. PELINDO REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

ADI SUGIRI

EGM PELINDO I



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

Berkenaan dengan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Bandung yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, M.M.
Jabatan : KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMATANJUNG PRIOK.

Dengan ini menyatakan dukungan atas pelaksanaan proyek perubahan berjudul: "STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN" yang dilaksanakan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : AKBP Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR
Kesatuan : DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI
NDH : 08

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Oktober 2023
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA

Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, M.M.
Np. 19800914 199703 1 002

KEPALA KANTOR SYAHBANDAR UTAMA

Branding Proyek Perubahan

Strategi marketing sebagai kunci keberhasilan dari Proyek Perubahan khusus untuk sektor publik. Proyek perubahan ini sangat bersentuhan dengan sektor publik karena menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik melalui suatu pengembangan sistem pelayanan yang sebelumnya manual menjadi digital , adalah dengan penerapan 4 P 1 C yaitu :

a) **Product**

- Panduan Standar Operasional Prosedur;
- Kebijakan PerKaba (Baharkam Polri)
- Armada, Sarana & Prasarana
- Dokumen Kerjasama;

b) **Place**

- Korpolaairud
- Ditpolairud Polda Seluruh Indonesia

c) **Price**

- Kolaborasi yang dibangun terjadi pengadaan dan kelengkapan infrastruktur secara bersama sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh Korpolaairud untuk Melakukan PAM ALKI pada kegiatan ilegal di Wilayah Perairan
- Terlaksananya penyelamatan kekayaan Negara terutama untuk Kekayaan Sumber Daya laut sehingga Kekayaan Negara Indonesia tidak dimanfaatkan oleh pihak Asing dengan adanya PAM ALKI.

d) **Promotion**

Key sukses factor menjadi standar untuk promosi di wilayah lainnya untuk menerapkan konsep serupa terutama untuk Direktorat Polairud lainnya di setiap wilayah maupun stakeholder lainnya. Promosi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Tiktok Youtube Banner, Rapat koordinasi, rapat sosialisasi untuk membangun sinergi dan kemitraan.



STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

e) Customer

1. Ditpolair
2. Bakamla
3. TNI AL
4. Imigrasi
5. BNN
6. DJBC
7. KKP
8. Dirjen Perhubungan Laut
9. PSDKP
10. Masyarakat Maritim

Sosialisasi juga dilakukan melalui Media Elektronik

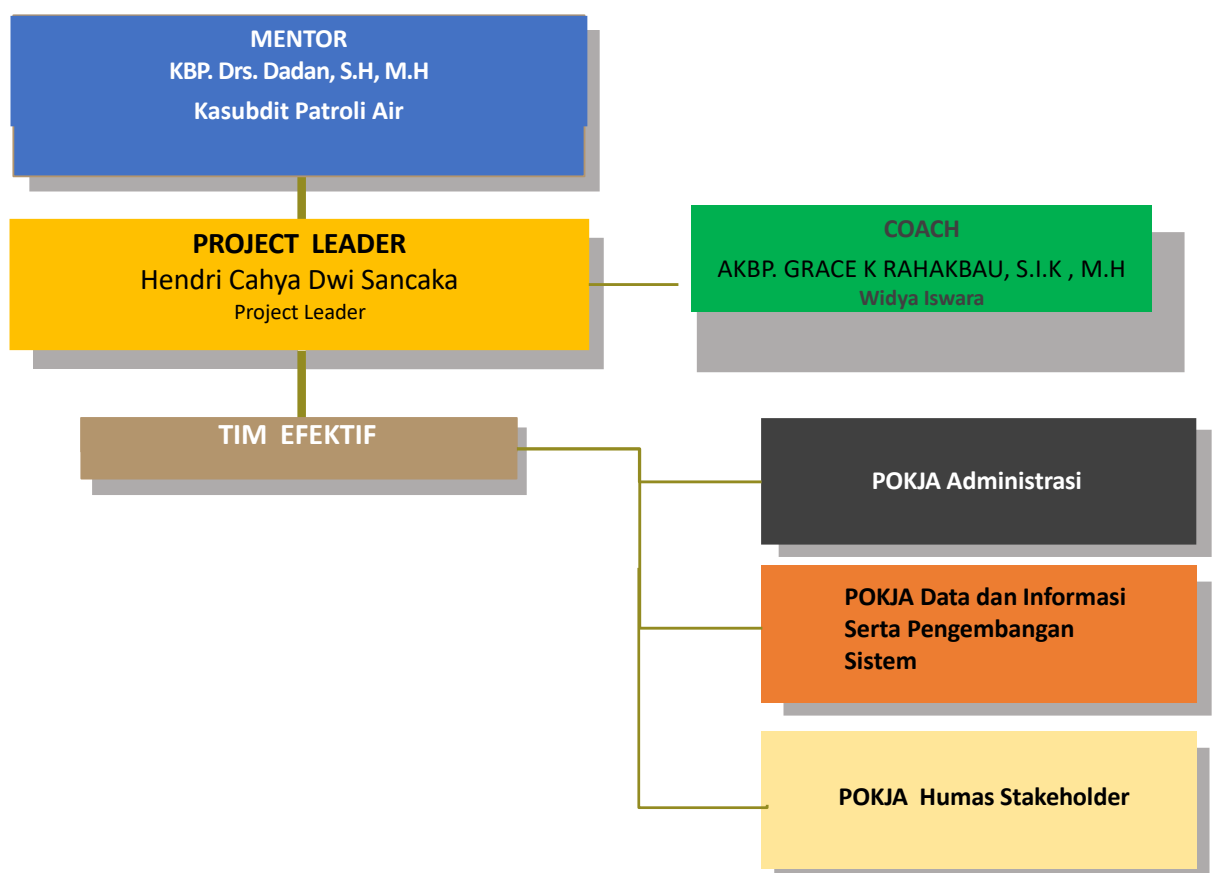


V. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

a. Pembangunan Team Efektif

Tata kelola proyek perubahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 12: Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan



TUGAS POKOK & FUNGSI

a. Mentor/Project Sponsor :

- Memberikan arah dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari proyek perubahan;
- Memberikan dukungan dalam pembuatan rancangan maupun implementasi dari proyek perubahan;



- Memberikan persetujuan dan kesepakatan atas Rancangan Proyek Perubahan, memberikan bimbingan dan advice kepada project leader dalam melaksanakan implementasi proyek perubahan.
- b. Coach :**
 - Memberikan arahan perihal teknik penulisan rancangan maupun laporan proyek perubahan;
 - Membantu memberikan konsultasi dan memantau kegiatan pelaksanaan proyek perubahan.
- c. Project Leader :**
 - Merancang proyek perubahan;
 - Melakukan eksekusi langsung terhadap semua kegiatan baik dari rancangan, implementasi kegiatan proyek perubahan maupun membuat laporan akhir;
 - Memimpin langsung jalannya kegiatan proyek perubahan.
- d. Pokja 1, Administrasi:**
 - Mempersiapkan dokumen yang di butuhkan baik dari rancangan, implementasi maupun laporan dalam proyek perubahan;
 - Melakukan dokumentasi baik video, photo dan lainnya dalam setiap aktivitas di proyek perubahan.
 - Membantu project leader dalam merancang surat kebijakan dan skema kebijakan termasuk membuat standar operasional prosedur yang di pergunakan untuk mendukung Pengamanan Wilayah Perairan ALKI
 - Menelaah peraturan peraturan lain yang kemungkinan terjadinya overlapping termasuk produk hukum di Kepolisian maupun Stakeholder.
- e. Pokja 2, Data dan Informasi Serta Pengembangan Sistem :**
 - Membantu project leader dalam menyiapkan kegiatan teknik proyek perubahan;
 - Membantu memberikan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan produk dari output proyek perubahan;
 - Membantu project leader dalam memecahkan masalah masalah berkaitan dengan teknik dan operasi kegiatan proyek perubahan.
- f. Pokja 3, Hubungan Masyarakat :**
 - Membantu project leader untuk komunikasi kepada masyarakat maupun kepada stakeholder;
 - Memberikan informasi kepada stakeholder tentang implementasi kegiatan dan memberikan update data yang diperlukan oleh stakeholder maupun project leader.



d. Anggaran

Anggaran yang telah digunakan untuk Implementasi Proyek Perubahan ini adalah Sebagai berikut :

No	Deskripsi	Estimasi Biaya	Keterangan
1	Komunikasi & Koordinasi Team Efektif, Pembuatan SOP	Rp. 5.000.000,-	Internal Korpolaairud
2	Administrasi (ATK) Kegiatan Proper	Rp. 3.500.000,-	Anggaran Polri/APBN
3	Pembuatan SOP	Rp.5.000.000.,-	Anggaran Polri/APBN
4	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Rp. 5.000.000,-	Anggaran Polri/APBN
	Estimasi Total Anggaran	Rp.18.500.000,-	

e. Strategi Publikasi

Strategi Publikasi juga dilakukan melalui sosialisasi baik online maupun offline termasuk juga menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Tiktok Youtube Banner, Rapat koordinasi, rapat sosialisasi untuk membangun sinergi dan kemitraan,

MANAJEMEN RESIKO

MASALAH

- Padatnya kegiatan Kepolisian beserta Stakeholders di tahun 2023 serta dalam kondisi penyesuaian pola kerja akibat pasca pandemi Covid-19
- Proyek perubahan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, sedangkan perencanaan anggaran dilaksanakan satu tahun sebelumnya.
- Polri Fokus Pembenahan Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat

RESIKO

- Tim pelaksana tidak dapat melaksanakan pentahapan proyek perubahan secara optimal
- Proyek perubahan tidak tepat waktu
- Tidak adanya anggaran

SOLUSI

- Membangun kesadaran tim pelaksana bahwa proyek perubahan ini mendukung efektivitas dan efisiensi untuk transformasi Digital
- Mengoptimalkan rapat tatap muka dan Rapat Secara Virtual (Daring)
- Memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa proyek perubahan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat
- Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam sistem terpenuhi
- Menyiapkan SDM yang handal dan mempunyai pengalaman
- Project Leader memanfaatkan anggaran yang sudah ada untuk dioptimalkan atau mengalihkan atas anggaran yang lain
- Project leader berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mensponsori dan memberikan dukungan anggaran
- Mengusulkan anggaran pengembangan aplikasi pada T.A.2024 dan T.A 2025

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT PROPER

No	Aktivitas	Anggaran	Metode
1	Peningkatan Kompetensi SDM	Dirpolair Korpolaairud	Pelatihan & Pembinaan
2	Pembuatan SOP	Dirpolair Korpolaairud	Analisis Sistem & Prosedur
3	Kebijakan Perkakor	Dirpolair Korpolaairud	Analisis

MELAKUKAN PELATIHAN SAR BAGI ANGGOTA



STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

MELAKUKAN PELATIHAN SELAM BAGI ANGGOTA



MELAKUKAN PELATIHAN DASHBOARD SYSTEM MANAGEMENT



PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI FGD PENGAMANAN ALKI





MELAKUKAN PEMBUATAN SOP



MELAKUKAN ANALISIS KEBIJAKAN PERDIR



PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

NO	KOMPONEN PERILAKU KEPEMIMPINAN	SUBKOMPONEN YANG PERLU PENGEMBANGAN	RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	RENCANA JADWAL PENGEMBANGAN (60 hari)
1	INTEGRITAS	Penyesuaian Terhadap Job Description	Analisis Tupoksi & Analisis Kebijakan Serta Penegakan Etika & Integritas dalam Job Des	OKTOBER 2023
2	KERJA SAMA	Komunikasi Efektif	Pengorganisasian Team Efektif & Kolaborasi Dengan Stakeholder	NOPEMBER 2023
3	MENGELOLA PROPER	Efektivitas Kepemimpinan Strategis	Merumuskan Serta Menyusun Perkakor	NOPEMBER 2023



MENJADI NARASUMBER PELATIHAN SAR



MELAKUKAN KOORDINASI dan BENCHMARKING DENGAN BAKAMLA



MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER UNTUK PENCAPAIAN TARGET PROPER

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN



PENGEMBANGAN DIRI PELATIHAN PENGENDALIAN KAPAL

MENJADI NARASUMBER FGD



2 KORAN MINGGUAN
MINGGU KEEMPAT NOVEMBER 2023

FOCUS KINI
Cinta, Rasi, dan Cerdas

KOLOM

Pengamanan ALKI Tingkatkan Harkamtibmas di Perairan

Oleh: AKBP Hendri CDS



Diterbitkan Oleh:

PT MEDIA EKSPRES KREATIF

Pengantar Umum:

Yudi Kurniawan

Pengantar Pembaca:

Yenni, S.E

Pengantar Redaksi:

Sadam Madiana

Wakil Pribadi:

Siti Solihah

Pengantar Penulis:

Isnail

Redaksi Pelaksana:

Reza

Wartawan Palembang:

Riza Mediana, Nidiana, Kiki Nardana, Eri Pungka, Suci, Dedy Saputra

Wartawan Pagar Alam:

Della Handika

Wartawan Muara Enim:

Rafi Adnan

Wartawan Ogan Ilir:

Witri Ananta

Wartawan Ogan Timur:

Aan

Wartawan Masi Banyuwangi:

Hafid Afriqsy, Andri Patricia Nora

Wartawan Empat Lawang:

Alfian

Wartawan Banyuwangi:

Irena

Wartawan Lahat:

Isnail

Wartawan Ogan Komering Ilir:

Rasmidi, Enan Saputra

Wartawan Pagi:

Yogi

Adrian

Herika Sri Nurul

Kusnanto

Nanda, S.E

Marketing/Kat:

Mika Rini

Creative Design/Layout:

Inal Sanjaya

Penyunting:

CV. StudiKarya Indo Citra

Alamat: Jl. Mayor Salim Babarsari, Sekip Jaya,

Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera

Selatan 30114

(For more content, please visit the Focus Kini website)

Alamat Redaksi:

Jalan Tegal Kertapati RT. 20 Blok No. 3, Kelurahan

Puji Darat Palembang Sumatera Selatan

0711-5543339

focuskini@gmail.com

INDONESIA sebagai negara maritim harus menjadi negara yang mampu memajukan wilayah laut sebagai pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari. Untuk mampu mewujudkan hal tersebut Korpolairud Baharkam Polri menggelar Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema "Peran Stakeholder Dalam Rangka Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Wilayah Perairan" yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Nov 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Wido-buddhisme Dipolairud Baharkam Polri.

FGD ini dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan yang digelar oleh AKBP Hendri CDS dengan judul "Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas di Wilayah Perairan". FGD ini sebagai salah satu metode project leader dalam rangka menggali saran masukan ide gagasan, baik dari narasumber selaku pengamat maritim maupun stakeholder maritim, seperti Kestasi Perikanan Laut dan Pesisir (KPLP), Bep dan Cui-kaBEC, Syahbandar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengempukasikan proyek perubahan yang sedang disusun.

Salah satu narasumber dalam FGD DR. Capt. Mardiana Haling, Jayawijaya, Pengamat Maritim dari Ratan Kelurga Alumni Lemhanas Strategic Center (KAL SC) yang merupakan dalam tulisannya, "Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Rangka Meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan" menyatakan Untuk menciptakan Harkamtibmas yang baik di wilayah ALKI Korpolairud Baharkam Polri dapat menerapkan beberapa langkah strategis.

"Yang pertama adalah Peningkatan Kerjasama Internasional. Korpolairud Baharkam Polri dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang kapalnya sering melintas di ALKI melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penanganan hukum terhadap pelanggaran di ALKI," sebutnya.

Kemudian lanjut pandangan Capt. Haling yang bisa diapa no. Kerjasama internasional penting untuk menciptakan keamanan dan ketertarikan di wilayah ALKI. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penanganan hukum terhadap pelanggaran di ALKI," sebutnya.

Diungkapkan Capt. Haling lagi, Korpolairud Baharkam Polri perlu melakukan strategi ketiga, yakni dalam hal Peningkatan dan Peningkatan Ancaman Non-Tradisional. Korpolairud Baharkam Polri dapat melakukan upaya pencegahan dan penanganan ancaman non-tradisional seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan melalui peningkatan pengawasan dan penanganan hukum. Perlu dipahami bersama terkait ancaman non-tradisional seperti IUU fishing dan pencemaran lingkungan dapat membahayakan keamanan dan ketertarikan lingkungan laut. Oleh sebab

itu penting pula personel Korpolairud Baharkam Polri melakukan peningkatan pengawasan dan penanganan hukum dalam membantu mencegah dan menanggulangi ancaman non-tradisional di wilayah ALKI. Strategi keempat yang patut dilaksanakan personel Korpolairud Baharkam Polri adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Strategi ini menurut Capt. Haling adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertarikan lingkungan laut melalui program edukasi dan kampanye. Serta melibatkan masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir, dalam pengawasan ALKI sebagai sumber informasi terkait pelanggaran seperti IUU fishing dan ancaman lainnya.

"Kesadaran dan pengetahuan masyarakat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertarikan di wilayah ALKI. Sosialisasi kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertarikan lingkungan laut. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ALKI dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri dalam memperoleh informasi terkait pelanggaran di wilayah ALKI," tegas Capt. Haling.

Dasar strategi yang selama ini terakumulasi menurut Capt. Haling yakni peningkatan pengawasan dan penanganan hukum. "Korpolairud Baharkam Polri perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan hukum terhadap pelanggaran laut, melalui peningkatan patroli dan penanganan hukum terhadap pelanggaran laut. Kecelakaan laut dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan dan penanganan hukum dapat membantu mencegah kecelakaan laut dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran laut," pungkas Capt. Haling. (*)

MENGELOLA PROPER, MENGARAHKAN DAN MENGORGANISASI TEAM EFEKTIF



PELATIHAN SAR DI LAUT

MENJADI PENULIS DI MEDIA CETAK

VI. KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROPER

Proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan baik pada jangka Menengah maupun Jangka Panjang melalui Komitmen Tindak lanjut yang dikeluarkan oleh pimpinan Korpolaairud Baharkam Polri.



**BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DADAN, S.H., M.H.;
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI;
NRP : 69040340;
Jabatan : KASUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI.

Nama : A.B. INDRATA, S.I.K., M.Si;
Pangkat : KOMISARIS BESAR POLISI;
NRP : 73120421;
Jabatan : KABAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI.

Nama : Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
Pangkat : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI;
NRP : 80091270
Jabatan : KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI

Berkomitmen untuk melanjutkan Proyek Perubahan dengan judul **“STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN”** di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri.

Jakarta, 17 November 2023

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

PESEKTA

Dr. Capt. HENDRI C.D.S., S.ST., M.Mar., M.M.
AKBP NRP 80091270

A.B. INDRATA S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73120421

MENTOR

DADAN, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69040340

Proyek perubahan dilanjutkan pada Jangka Menengah & Jangka Panjang Dengan Program Aktivitas Sebagai berikut :

JANGKA MENENGAH

- 1. Melaksanakan Sosialisasi Draft Kebijakan PerKaba di Ditpolairud yang dilalui ALKI Seluruh Indonesia**
- 2. Melaksanakan Pengesahan PerKaba Tentang Pengamanan Wilayah ALKI**
- 3. Penyusunan Tambahan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan ALKI, Pengadaan Armada , Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI di Korpolairud**
- 4. Pengajuan Tambahan Anggaran Patroli Khusus Pengamanan, Pengadaan Armada , Sarana & Prasarana Patroli Perairan ALKI Ke Mabes Polri**

JANGKA PANJANG

- 1. Pengadaan Kebutuhan Patroli Khusus Pengamanan, Armada, Sarana & Prasarana Untuk Patroli Perairan ALKI**
- 2. PKS antar Stakeholder di wilayah perairan ALKI untuk Sinergitas Pengamanan Perairan**
- 3. Implementasi Patroli di semua Wilayah Perairan ALKI**



VII. KETERKAITAN MATA PILIHAN

Proyek perubahan ini mempunyai keterkaitan pada mata pelatihan pilihan dalam PKN 2 yaitu :

- a. **Anti Narkoba**, pengambilan mata kuliah anti narkoba dikarenakan wilayah perairan ALKI rawan terhadap peredaran Narkoba sehingga perlu pemahaman tentang mekanisme peredaran yang dilakukan oleh Bandar narkoba dan juga masuknya dari negara asing.
- b. **Pengadaan Barang dan Jasa**, Perencanaan & Pengadaan Barang Jasa karena pada proper akan dilakukan pengadaan armada , sarana dan prasarana yang mendukung Patroli Air di ALKI sehingga dibutuhkan mata pelatihan ini.
- c. **Pertumbuhan Ekonomi Hijau**, Indonesia saat ini sedang mengembangkan ekonomi hijau yaitu ekonomi yang hemat energi dan mempunyai keberlanjutan sehingga dibutuhkan agar ekonomi di kawasan maritim dapat terjaga dengan baik.



VIII. PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN) & LESSON LEARNT

KESIMPULAN

1. Tahapan Proyek Perubahan pada Jangka Pendek Berhasil Dilaksanakan semua.
2. Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Pengamanan ALKI berhasil di laksanakan
3. Proper Menghasilkan Draft Perkaba, SOP Serta Buku Panduan Pengamanan ALKI
4. Proper akan terus dilanjutkan baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang & Disyahkan nya Perkaba Tentang Pengamanan ALKI

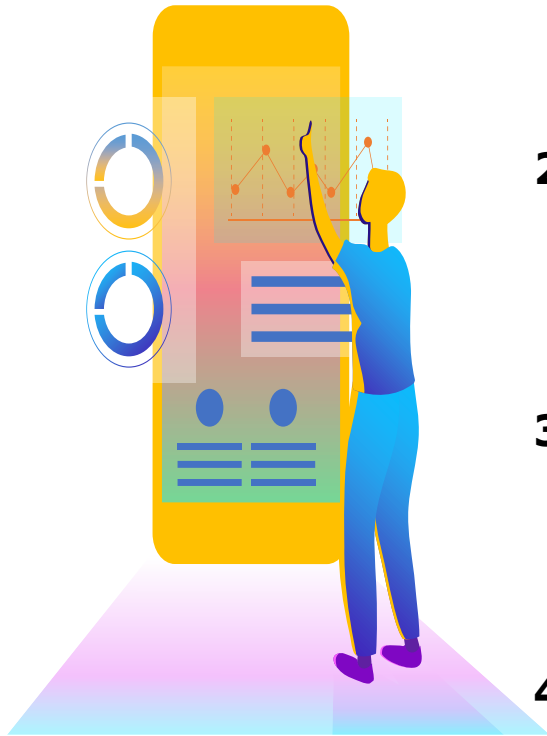
SARAN

1. Perlunya membangun kesadaran semua Lembaga negara dalam Menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan
2. Program yang telah dilaksanakan pada proyek perubahan agar dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan Stakeholder lainnya

REKOMENDASI

1. Proyek perubahan perlu di lanjutkan baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang sehingga menjadikan Indonesia Terpelihara Harkamtibmas Wilayah perairan
2. Pengamanan ALKI Dalam menjaga Harkamtibmas Wilayah Perairan membutuhkan anggaran dan penambahan Peralatan serta Armada yang canggih.

LESSON LEARNT



- 1. Komunikasi, Sinergitas dan Kolaborasi Merupakan Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan**
- 2. Pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam menggerakkan semua sumberdaya untuk mencapai sasaran suatu organisasi**
- 3. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu beradaptasi atas perubahan lingkungan dengan strategi yang tepat**
- 4. Inovasi & Kepemimpinan Strategis merupakan kunci utama suatu organisasi untuk merubah suatu sistem**

**LAMPIRAN : RAPAT AWAL TEAM
EFEKTIF:**

- 1. SURAT UNDANGAN**
- 2. ABSENSI**
- 3. NOTULENSI**



KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-01/IX/SIP.1.1./2023/PKN II

Kepada : Daftar Nama Telampir

Dari : Kasilongmat Subdit Patroliair Selaku
Project Leader

Hal : Undangan rapat.

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
- c. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr.Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kehadiran Komandan, Senior dan rekan-rekan dalam acara rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada :

- a. hari / tanggal : Jumat / 22 September 2023;
- b. waktu : 08.00 WIB s.d selesai
- c. tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair Korpolaairud;
- d. pimpinan : Kasubbag Kerma Dagri Bagkerma Korpolaairud Baharkam
Polri Selaku Ketua Tim Efektif
- e. acara : Rapat Awal Proyek Perubahan.

3. Demikian....

2.

2. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 21 September 2023

KASITONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR

Selaku

PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

DAFTAR NAMA UNDANGAN TIM EFEKTIF
DALAM RANGKA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.E.Sy., M.M.	AKBP 69040511	KASUBBAG KERMADAGRI BAGKERMA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	KATIM
2.	HARRY GUNAWAN, S.Kom., M.M.	AKBP 73060625	KASUBBAGREN BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
3.	DICKY RAHADIAN EFFENDI, S.H.	KOMPOL 83091351	KAURMIN SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
4.	KUWAT, S.ST.	KOMPOL 77050579	DAN KP.KEPODANG-5001 SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
5.	YULI EKO SULISTYANTO, S.ST	KOMPOL 79071573	KAURTU DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
6	ROIS ALI MARTA, S.H.	KOMPOL 79052195	PAUR TEKKOM SUBBAGTIK BAGOPSNAL DAN TIK KORPOLAIRUD	ANGGOTA
7	SUPRIYANTO, S.ST., M.M.	KOMPOL 82041533	PAURBINKAR SUBBAGSDM BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
8	JOKO SUPRAYITNO, S.ST.	AKP 77120353	PS. PAUR WASISMET DAN PID SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
9	HARI SISWADI, S.T.	AIPDA 82071423	BAMIN URDALGAR SUBBAGREN BAGRENMIN KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA

11. KHOIRON....

2.

1	2	3	4	5
10	KHOIRON AYATULLOH	BRIGADIR 92030022	BAMIN URBINTIBLUH SIBINTIBLUH SUBDIT BINMASAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
11	DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.	BRIGADIR 91070098	BANIT II UNIT TIMSUS SILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA
12	AGUNG BUDI KUSUMA	PENGATUR TK. I 198808172008 011001	BANUM PADA URPATROLI SIPATWALAIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	ANGGOTA



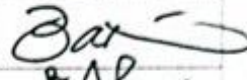
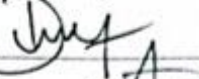
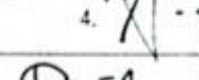
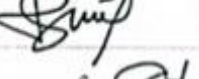
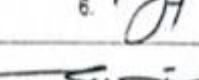
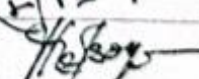
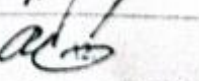
Jakarta, 21 September 2023
 SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
 Selaku
 PROJECT LEADER
Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

ABSENSI RAPAT TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Hari/Tanggal: Jumat/ 22 September 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5
1.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.E.Sy., M.M.	AKBP 69040511	KETUA TIM EFEKTIF	1. 
2.	HARRY GUNAWAN, S.Kom., M.M.	AKBP 73060625	ANGGOTA	2. 
3.	DICKY RAHADIAN EFFENDI, S.H.	KOMPOL 83091351	ANGGOTA	3. 
4.	KUWAT, S.ST.	KOMPOL 77050579	ANGGOTA	4. 
5.	YULI EKO SULISTYANTO, S.ST	KOMPOL 79071573	ANGGOTA	5. 
6.	ROIS ALI MARTA, S.H.	KOMPOL 79052195	ANGGOTA	6. 
7.	SUPRIYANTO, S.ST., M.M.	KOMPOL 82041533	ANGGOTA	7. 
8.	JOKO SUPRAYITNO, S.ST.	AKP 77120353	ANGGOTA	8. 
9.	HARI SISWADI, S.T.	AIPDA 82071423	ANGGOTA	9. 
10.	KHOIRON AYATULLOH	BRIGADIR 92030022	ANGGOTA	10. 
11.	DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.	BRIGADIR 91070098	ANGGOTA	11. 
12.	AGUNG BUDI KUSUMA	PENGATUR TK. I 198808172008011001	ANGGOTA	12. 

Jakarta, 22 September 2023
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR

Selaku
PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTULA RAPAT TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

I. DASAR:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
3. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr. Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

II. PELAKSANAAN:

1. Rapat Tim Efektif dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:
hari : Jumat;
tanggal : 22 September 2023;
pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai;
tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
pimpinan : Kasubbag Kerma Dagri Bagkerma Korpolaairud Baharkam Polri Selaku Ketua Tim Efektif
peserta : Tim Efektif
2. Pembahasan rapat:
 - a. Project Leader
 - 1) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua dan Seluruh Tim Efektif yang hadir dalam kegiatan rapat awal;
 - 2) Menjelaskan Tugas Tim Efektif;
 - 3) Menjelaskan Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Pencapaian dan Deadline Pelaksanaan.
 - 4) Pembagian Tim Efektif menjadi 3 Sub Tim Efektif.
 - 5) Diharapkan *Output* dari *Project* ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Korpolaairud Baharkam Polri dan membangun sinergitas antara Stakeholder Maritim.

b.Ketua....

2.

b. Ketua Tim Efektif

- 1) Ucapan terima kasih kepada Project Leader telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada kami menjadi Ketua Tim Efektif, akan melaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapai dan terselesaikan tugas Pelatihan Kepemimpinan Nasional;
- 2) Agar kepada seluruh Tim Efektif bekerja semaksimal mungkin untuk lancarnya proses penyusunan Produk Proyek Perubahan ini;
- 3) Pada rapat awal ini kami tekankan kepada Tim untuk dapat memahami Tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- 4) Untuk mempermudah Komunikasi kita buat *WhatsApp Group* dan selanjutnya untuk efektif dan efisien waktu penugasan dan pelaporan dapat dimonitor di *WhatsApp Group*.

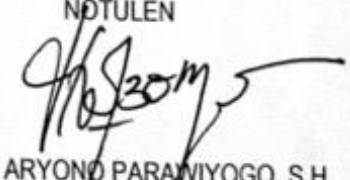
c. Anggota Tim Efektif

- 1) Terimakasih kepada Project Leader telah menunjuk kami menjadi Tim Efektif, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapai dan terselesaikan tugas secara efektif dan efisien.
- 2) Pada dasarnya kami siap membantu sesuai apa yang diperintahkan oleh *Project Leader* melalui Ketua Tim Efektif.

Mengetahui,
SILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER

Dr. Capt. HENDRI C.D.S, S.ST., M.Mar., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

BANIT II UNIT TIMSUS SILONGMAT
Selaku
NOTULEN


DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.
BRIGADIR POLISI NRP 91070098

**LAMPIRAN : ANALISI KEBIJAKAN
DIRPOLAIR**

- 1. SURAT UNDANGAN**
- 2. ABSENSI**
- 3. RISALAH STRATEGI & ACTION
PLAN**

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-02/IX/SIP.1.1./2023/PKN II

Kepada : Daftar Nama Telampir

Dari : Kasilongmat Subdit Patroliair Selaku
Project Leader

Hal : Undangan rapat.

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
- c. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr. Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kehadiran Komandan, Senior dan rekan-rekan dalam acara rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

- a. hari / tanggal : Rabu / 27 September 2023;
- b. waktu : 08.00 WIB s.d selesai;
- c. tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair Korpolaairud;
- d. pimpinan : Kasubbag Kerma Dagri Bagkerma Korpolaairud Baharkam Polri Selaku Ketua Tim Efektif;
- e. acara : Rapat Analisis Peraturan Dirpolair tentang Patroli ALKI.

3. Demikian

2.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 26 September 2023
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER

Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

ABSENSI RAPAT KE - 2 TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Hari/Tanggal: Rabu/27 September 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5
1.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.E.Sy., M.M.	AKBP 69040511	KETUA TIM EFEKTIF	1.
2.	HARRY GUNAWAN, S.Kom., M.M.	AKBP 73060625	ANGGOTA	2.
3.	DICKY RAHADIAN EFFENDI, S.H.	KOMPOL 83091351	ANGGOTA	3.
4.	KUWAT, S.ST.	KOMPOL 77050579	ANGGOTA	4.
5.	YULI EKO SULISTYANTO, S.ST	KOMPOL 79071573	ANGGOTA	5.
6.	ROIS ALI MARTA, S.H.	KOMPOL 79052195	ANGGOTA	6.
7.	SUPRIYANTO, S.ST., M.M.	KOMPOL 82041533	ANGGOTA	7.
8.	JOKO SUPRAYITNO, S.ST.	AKP 77120353	ANGGOTA	8.
9.	HARI SISWADI, S.T.	AIPDA 82071423	ANGGOTA	9.
10.	KHOIRON AYATULLOH	BRIGADIR 92030022	ANGGOTA	10.
11.	DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.	BRIGADIR 91070098	ANGGOTA	11.
12.	AGUNG BUDI KUSUMA	PENGATUR TK. I 198808172008011001	ANGGOTA	12.

Mengetahui
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER

Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTULA RAPAT KE-2 TIM EFEKTIF
ANALISIS PERATURAN DIRPOLAIR TENTANG PATROLI ALUR ALKI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

I. DASAR:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
3. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr. Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

II. PELAKSANAAN:

1. Rapat Tim Efektif dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:
hari : Rabu;
tanggal : 27 September 2023;
pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai;
tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
pimpinan : Kasubbag Kerma Dagri Bagkerma Korpolaairud Baharkam Polri
Selaku Ketua Tim Efektif
peserta : Tim Efektif
2. Pembahasan rapat Analisis Perdir:
 - a. Project Leader.
 - 1) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua dan Seluruh Tim Efektif yang hadir dalam kegiatan rapat kedua Analisis Peraturan Dirpolair tentang Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia;
 - 2) Didalam Ketentuan Umum memuat Pengertian-pengertian yang dimuat dalam Peraturan Dirpolair tentang Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia agar ruang lingkup pembahasannya terbatas;

2.

- 3) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman teknis bagi Komandan Kapal Polisi dalam melaksanakan patroli perairan perbatasan sehingga dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.
- 4) Pembuatan peraturan Direktur Polair Baharkam Polri berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a) prinsip legalitas;
 - b) prinsip kewajiban umum;
 - c) prinsip nesesitas;
 - d) prinsip proporsionalitas;
 - e) prinsip reasonable/masuk akal;
- b. Tanggapan Ketua Tim Efektif
 - 1) Ketentuan Umum memuat Pengertian-pengertian yang dimuat dalam Peraturan Dirpolair tentang Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia sangat membantu dalam Mendefinisikan maksud dalam Peraturan Tersebut.
 - 2) Tujuan peraturan ini sangat jelas yaitu sebagai pedoman teknis bagi Komandan Kapal Polisi dalam melaksanakan patroli perairan perbatasan sehingga dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.
 - 3) Prinsip-prinsip yang digunakan daam membuat peraturan ini sangat berkaitan dengan tugas Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Tanggapan Peserta
 - 1) Pengertian-pengertian yang dimaksud dalam Ketentuan Umum tersebut sangat membantu dalam memberikan Gambaran awal pembahasan yang ada didalam Peraturan Dirpolair tentang Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia;
 - 2) Awal pembuatan Perdir memang harus diawali dengan pengertian/Definisi dari yang dimuat didalamnya;
 - 3) Dalam Perdir tersebut memuat Tujuan yaitu sebagai pedoman teknis bagi Komandan Kapal Polisi dalam melaksanakan patroli perairan perbatasan sehingga dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.
3. Pembahasan Rapat BAB II Sarana dan Prasarana Patroli ALKI
 - a. Project Leader.
 - 1) Sasaran patroli ALKI
 - a) ALKI;
 - b) Kapal-kapal yang berlayar di ALKI;
 - c) pesawat udara;
 - d) Instalasi yang berada di ALKI.

3.

2) ALKI terdiri dari:

- a) ALKI I untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya, meliputi perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda;
- b) ALKI II untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia dan sebaliknya, meliputi perairan Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok;
- c) ALKI III (III-A, III-D, III-E) untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya, meliputi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu;
- d) ALKI III (III-B, III-C) untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau ke Laut Arafura dan sebaliknya, meliputi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda;
- e) peta ALKI tersebut di atas yang lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini; dan
- f) titik penghubung yang membentuk poros ALKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

3) Kapal-kapal yang berlayar di ALKI

- a) kapal asing
- b) kapal ikan asing; dan
- c) kapal negara dan kapal perang asing.

4) pesawat udara

- a) Pesawat udara;
- b) Pesawat udara amfibi; dan
- c) Helikopter;

5) Instalasi yang berada di ALKI

- a) *Rig* atau *Platform*;
- b) mercusuar;
- c) pipa bawah laut; dan
- d) kabel bawah laut.

6) Alat utama untuk melaksanakan patroli ALKI menggunakan Kapal Polisi meliputi Kapal polisi Klas B1, A3, A2, A1 dan didukung oleh pesawat udara dan/atau helikopter.

7) Alat bantu yang harus dimiliki Kapal Polisi dalam melaksanakan patroli ALKI adalah :

- a) peta ALKI;
- b) peralatan menjangka peta;
- c) alat penentu posisi yang akurat;
- d) *ARPA*;
- e) *AIS*; dan
- f) alat komunikasi standar maritim dan udara.

4.

8) Dalam pelaksanaan patroli ALKI harus menggunakan pakaian dinas.

b. Tanggapan Ketua Tim Efektif

- 1) Sasaran Patroli ALKI termuat jelas didalam Peraturan Direktur sehingga Para Komandan kapal dan anggota yang bertugas dengan jelas pula apa yang harus dilakukan;
- 2) Pembagian Alur Laut Kepulauan Indonesia termuat dalam Pasal 4 Poin 2.E5U sudah sangat jelas alur ALKI untuk pelaksanaan Patroli.

c. Tanggapan Peserta

- 1) Melihat dari Peraturan yang telah dimuat dari mulai Ketentuan Umum sampai dengan Bab Penutup dapat diyakini bahwa Komandan Kapal atau pun anggota dilapangan sangat mengerti Sasaran dan aturan aturan yang dimuat ini.



Mengetahui,
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER
Dr. Capt. HENDRI C.D.S., S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

BANIT II UNIT TIMSUS SILONGMAT
Selaku
NOTULEN
DIMAS ARYONOP., S.H..
BRIGADIR POLISI NRP 91070098

**LAMPIRAN : FGD DENGAN
STAKEHOLDER**

- 1. SURAT UNDANGAN**
- 2. ABSENSI**
- 3. RISALAH FGD**



KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
Jl. RE. Martadinata 1/I Tanjung Priok Jakarta Utara

Jakarta, 8 November 2023

Nomor : B/ 2 /XI/2023/PKN II
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan Focus Group Discussion

Kepada
Yth. Daftar Undangan Terlampir
di
Tempat

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
 - c. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr.Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Kepada Ka Permohonan Peserta dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2023 dengan Tema "PERAN STAKEHOLDER MARITIM PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS DI WILAYAH PERAIRAN" yang akan diselenggarakan pada:
 - A. Hari/Tanggal : Selasa/14 November 2023;
 - B. Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai ;
 - C. *Project Leader* : Kasilongmat Subdit Patroliair Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
 - D. Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, Jalan RE. Martadinata 1/I Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - E. Pakaian : Yang berlaku pada saat itu.
3. Dimohon kepada Bapak/Ibu berkenan menugaskan Pejabat/Personil yang berkompeten sebanyak 2 (dua) Personil untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Brigadir Polisi Dimas Aryono Parawiyogo, S.H. Nomor HP.085223495315.

4.Demikian....

2.

4. Demikian menjadi maklum

KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR

Selaku

PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWISANCAKA, M.Mar., M.M.
A. LINTOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270



KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
Jl. RE. Martadinata 1/1 Tanjung Priok Jakarta Utara

Lampiran Undangan Kasilongmat
Nomor : B/200/2023/PKN II
Tanggal: 8 November 2023

DAFTAR UNDANGAN

A. INSTANSI LUAR

1. Kepala Pangkalan Kplp Kelas I Tanjung Priok;
2. Kepala Kesyahbandaran Utama Kelas I Tj.Priok;
3. Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok.

B. DITPOLAIR

1. Komandan KP. Bharata-8004;
2. Komandan KP. Prahasta-7015;
3. Komandan KP. Hanoman-7011;
4. Komandan KP. Abimanyu-7010;
5. Komandan KP. Kresna-7004;
6. Komandan KP. Sadewa-7003;
7. Komandan KP. Kasturi-6002;
8. Komandan KP. Gelatik-5016;
9. Komandan KP. Kepodang-5001;
10. Komandan KP. Murai-4018;
11. Komandan KP. Balam-4017;
12. Komandan KP. Gajah Laut-3019;
13. Komandan KP. Bittern-3016;
14. Komandan KP. Zaitun-3014;
15. Komandan KP. Sikatan-3012.

KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER



HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, M.Mr., M.M.
KORPRI KEMENTERIAN BESAR POLISI NRP 80091270



KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
Jl. RE. Martadinata 1/1 Tanjung Priok Jakarta Utara

Lampiran Undangan Kasilongmat
Nomor : B/2/XI/2023/PKN II
Tanggal: 8 November 2023

JADWAL KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)* DENGAN TEMA
PERAN STAKEHOLDER MARITIM DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
UNTUK MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS DI WILAYAH PERAIRAN

Waktu (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30 - 09.00	Registrasi	Seksi Penerima Tamu
09.00 - 09.05	Pembukaan	MC
09.05 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen
09.10 - 09.15	Pembacaan doa	Pembaca Doa
09.15 - 09.25	Sambutan Pembukaan	Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolaairud
09.25 - 09.35	Sesi Foto Bersama dan	PID
09.35 - 09.50	Coffe Break	Seksi Konsumsi
09.50 - 10.05	Paparan Project Leader	Project Leader
10.05 - 10.45	Paparan Narasumber	Seksi Materi
10.45 - 11.20	Diskusi Tanya Jawab	Moderator
11.20 - 11.25	Pembacaan Kesimpulan Hasil Diskusi	Moderator
11.25 - 11.35	Penutupan	MC

KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DITPOLAIR

Selaku

PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, M.Mar., M.M.
ALUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023
 AKBP HENDRI CAHYA DWI SANCAKA

Hari/Tanggal: Selasa/ 14 November 2023

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1		Pangkalan Klp Kelas I Tanjung Priok		
2		Pangkalan Klp Kelas I Tanjung Priok		
3	IBNU MEZA	Kesyahbandaran Utama Kelas I Tj.Priok	PENINDEKATAN	Ri
4	WIBOJO (AKUM)	Kesyahbandaran Utama Kelas I Tj.Priok	PAHLAWA KAPAL KUSN	
5		Pangkalan PSDKP Jakarta		
6	Erwin SPN	Pangkalan PSDKP Jakarta	Peselauga Kepulauan	
7	Agung Rinday	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok	Kepala Pangkalan	
8	Samp T.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Priok	ke Nuntika	

2.

1	2	3	4	5
9	R. Murni	KP. Bharata-8004	Dan Lt. Kurni	
10		KP. Prahasta-7015	Dan Lt. Prahasta 7015	
11	CATUL PERDI ASWIN	KP. Hanoman-7011	DAN Lt. Hanoman 7011	
12	CALITO	KP. Abimanyu-7010	DAN Lt. ABIMANYU 7010	
13	DHARMA SPESIAL	KP. Kresna-7004	PS DAN	
14	Daniel dnyang	KP. Sadewa-7003	Dan Lt. Sadewa 7003	
15	Sulwandi	KP. Kasturi-6002	Dan Lt. Kasturi 6002	
16	Masri Brachtiar	KP. Gelatik-5016	Dan Lt. Gelatik 5016	
17	KUNUT	KP. Kepodang-5001	Dan Lt. Kepodang-5001	
18	SULIKAN	KP. Murali-4018	DAN Lt. Murali-4018	
19	MUSTOFA	KP. Balam-4017	DAN Lt. Balam 4017	

3.

1	2	3	4	5
20	ERUARDUS	KP. Gajah Laut-3019	DAN KP BITEPN 3016	
21	Raus Simangunt	KP. Bittern-3016	DAN KR. Gajah Laut 3019	
22	STEPHANUS ADHYATMA P.	KP. Zaitun-3014	DAN. KP. ZAITUN 3014	
23	Lucky S.W	KP. Sikatan-3012	DAN. KP. SIKATAN 3012	
24	Tanjung D	KP. Pipit- 3003	DAN. KP. Pipit-3003	
25	MARSHALL	KP. Pipit- 3003	DAN. KP. Pipit-3003	

Mengetahui,
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR
Sebagai
PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRIC D.S. M.Mar. M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

NOTULA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PATROLI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

I. DASAR:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
3. Surat Perintah Kepala Korpolarud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr. Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

II. PELAKSANAAN:

1. Rapat Tim Efektif dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:
hari : Selasa;
tanggal : 14 November 2023;
pukul : 08.00 Wib s.d. Selesai;
tempat : Ruang Rapat gedung Ditpolair lantai 2 Korpolarud Baharkam Polri;
peserta : KPLP KELAS 1 TANJUNG PRIOK, KESYAHBANDARAN UTAMA KELAS 1 TANJUNG PRIOK, PSDKP JAKARTA, SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK DAN PARA KOMANDAN KAPAL PANGKALAN.
2. Pembahasan rapat:
 - a. Kata sambutan oleh kasubdit gakkum kombespol I Wayan Suparta Yadya S.I.K dan sekaligus pembuka acara pada pukul 09.00 wib. Pada kesempatan ini Wilayah Indonesia memenuhi 3 alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan polairud memiliki 73 armada kapal dan 1 armada kapal yang besar yang berfungsi untuk mengamankan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) Indonesia.
 - b. Pembahasan oleh moderator Dr. Capt. Marcellus Jayawibawa S.SIT.,M.Mar tentang strategi korpolarud baharkam polri pada pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dalam rangka meningkatkan harkamtibmas wilayah perairan. Wilayah diperjuangkan dengan unflos yang hasil pemikiran bangsa Indonesia.

2.

Angkatan Laut bukan ditugaskan untuk rakyat sipil namun yang ditugaskan untuk rakyat sipil adalah polri dan Indonesia memiliki 17,450 pulau ya karna Indonesia merupakan merupakan negara maritim. Bagi negara maritim seperti Indonesia yang jika digabungkan dengan lautannya yang sangat luas.

Dan Indonesia memiliki 3 alur laut dan seharusnya ini bisa meningkatkan ekonomi Indonesia karena dalam setahun bisa 400,000 kapal asing yang melintas oleh maka itu setidaknya kita bisa membangun rest area dilaut dan disitu polairud dibutuhkan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan yaitu kita bisa melaporkan keadaan cuaca kepada kapal-kapal yang melintas dan kita sebaiknya juga melakukan kerja sama dengan pihak lain yang tidak mengganggu fungsi kita seperti contoh : polairud mempunyai 1 kapal besar dan bea cukai juga mempunyai 1 kapal besar oleh karena itu kapal besar ini jangan berkumpul di satu titik bisa setiap bulan Januari kapal airud mangkal di Jakarta dan bea cukai berotasi ke wilayah lain dan begitu pun sebaliknya yang fungsinya supaya dapat memaksimalkan pengamanan di wilayah laut Indonesia.

Alur laut dibitung, natuna, selat malaka dan lain-lain seharusnya bisa memaksimalkan pengeluaran 1,400 triliun dana untuk mengelola wilayah maritim semaksimal mungkin untuk membangun ekonomi kearah yang lebih baik.

Menegakkan hukum ini masih mejadi problematika dan dilematika karena wilayah alur laut kita ini tidak Semaksimal mungkin dikelola .

Kesimpulan saya adalah meningkatkan kesadaran Masyarakat karena Indonesia ini adalah negara maritim dan polairud dan instansi lain dapat berkerja sama untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia.

c. Saran/tanggapan dari peserta

- 1) Bea cukai : keterkaitan kamtibmas kami berkaitan dengan fungsi dan kita mempunyai 3 alur laut oleh karena itu kita harus melakukan pengamanan di wilayah Indonesia.
Jadi setiap barang yang melewati perbatasan Indonesia itu terhitung sebagai hutang dan harus dibayar kenegara Indonesia dan Ketika suatu barang dibongkar ditempat yang tidak resmi maka itu disebut penyeludupan dan kita harus membangun komunikasi antara bea cukai, TNI Angkatan laut, KPLP dan pol airud yang tidak mengganggu dari pada fungsi masing-masing yang bertugas menjaga harkamtibmas yang lebih kuat jika komunikasi dan koordinasi ini terjalin dan mari kita sama-sama menjaga wilayah laut Indonesia.
- 2) KSOP : kami sangat mendukung stakeholder maritim Indonesia dan kita bisa melakukan latihan gabungan untuk menjaga wilayah alur laut Indonesia;
- 3) KKP : menurut UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan diperkuat oleh UU cipta kerja . kami baru mengungkap kasus tentang pengisapan pasir laut yang dimana telah mengganggu rongga laut wilayah laut Indonesia yang mana menguntungkan pihak individu dan kami melakukan pengawasan di 4 wilayah Lampung, Jawa barat ,DKI Jakarta, Banten kami mengawasi hewan yang dilindungi dan kami lembaga

3.

juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui sms gate way dan kami juga dapat membagikan data hasil observasi dan kami juga melakukan penanganan ruang laut yang tidak sesuai dan kami juga mau melakukan integritas dengan polair tentang penangkapan data perikanan di wilayah laut indonesia.

Mengetahui,
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI C.D.S, S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

BANIT II UNIT TIMSUS SILONGMAT
Selaku
NOTULEN



DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.
BRIGADIR POLISI NRP 91070098

LAMPIRAN : PENYUSUNAN DRAFT PERKABA

- 1. SURAT UNDANGAN**
- 2. ABSENSI**
- 3. DRAFT PERKABA**

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR
SILONGMAT

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 6 /XI/SIP.1.1./2023/PKN

Kepada: Daftar Nama Telampir

Dari : Kasilongmat Subdit Patroliair Selaku *Project Leader*

Perihal : undangan rapat.

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
- c. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr. Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kehadiran Komandan, Senior dan rekan-rekan dalam acara rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

- a. hari / tanggal : Senin / 13 November 2023;
- b. waktu : 08.00 WIB s.d selesai;
- c. tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
- d. pimpinan : Kasubbag Kerma Dagri Bagkerma Korpolaairud Baharkam Polri Selaku Ketua Tim Efektif;
- e. acara : Penyusunan Draft Perkaba tentang Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia.

3. Demikian

2

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 10 November 2023
KASUBIT PATROLIAIR
Selaku
PROJECT LEADER



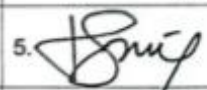
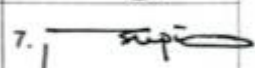
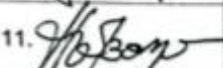
Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

ABSENSI RAPAT KE - 6 TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Hari/Tanggal: Senin/13 November 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5
1.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.E.Sy., M.M.	AKBP 69040511	KETUA TIM EFEKTIF	1. 
2.	HARRY GUNAWAN, S.Kom., M.M.	AKBP 73060625	ANGGOTA	2. 
3.	DICKY RAHADIAN EFFENDI, S.H.	KOMPOL 83091351	ANGGOTA	3. 
4.	KUWAT, S.ST.	KOMPOL 77050579	ANGGOTA	4. 
5.	YULI EKO SULISTYANTO, S.ST	KOMPOL 79071573	ANGGOTA	5. 
6.	ROIS ALI MARTA, S.H.	KOMPOL 79052195	ANGGOTA	6. 
7.	SUPRIYANTO, S.ST., M.M.	KOMPOL 82041533	ANGGOTA	7. 
8.	JOKO SUPRAYITNO, S.ST.	AKP 77120353	ANGGOTA	8. 
9.	HARI SISWADI, S.T.	AIPDA 82071423	ANGGOTA	9. 
10.	KHOIRON AYATULLOH	BRIGADIR 92030022	ANGGOTA	10. 
11.	DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.	BRIGADIR 91070098	ANGGOTA	11. 
12.	AGUNG BUDI KUSUMA	PENGATUR TK. I 198808172008011001	ANGGOTA	12. 

Jakarta, 13 November 2023
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270



PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai Standar Operasioanal Prosedur pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas agar berjalan secara efektif, efisien, profesional dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri yang dimaksud dengan:



- 2 -

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Polri yang selanjutnya di sebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian.
4. Badan Pemelihara Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
5. Kepala Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.
6. Biro Perencanaan dan Administrasi Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Rorenmin Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas yang menyusun perencanaan dan organisasi, manajemen sarpras, personalia, kinerja, mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, serta menyusun kebijakan dan rencana strategik dan pengembangan kekuatan fungsi dan jaringan dalam pemeliharaan kamanan.
7. Kepala Rorenmin Baharkam Polri yang selanjutnya di sebut Karorenmin Baharkam Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Birorenmin Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri.
8. Biro Pembinaan Operasional Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Robinopsnal Baharkam Polri adalah unsur pelaksanaan tugas perencanaan, pembinaan dan manajemen latihan, melaksanakan pembinaan dan pelatihan operasional, kerja sama dibidang pelatihan maupun operasi, serta melaksanakan analisis dan evaluasi di lingkungan Baharkam Polri.
9. Kepala Robinopsnal Baharkam Polri yang selanjutnya di sebut Karobinopsnal Baharkam Polri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staff pada Birobinopsnal Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri.
10. Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri yang selanjutnya di sebut Korbinmas Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat, dan dalam batas kewenangan yang ditetapkan menyelenggarakan fungsi pembinaan masyarakat pada

- 3 -

tingkat pusat dalam rangka pemeliharaan keamanan guna terwujudnya situasi dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

11. Kepala Korbinmas Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kakorbinmas Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Korbinmas Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri.
12. Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Korsabhara Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada dibawah Kabaharkam Polri bertugas menyelenggarakan fungsi Sabhara pada tingkat pusat, yang meliputi fungsi Samapta, Pamobvit dan Polisi Satwa, dalam rangka pemeliharaan keamanan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
13. Kepala Korsabhara Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kakorsabhara Baharkam Polri adalah unsur pimpinan pada Korsabhara Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri.
14. Korps Polisi Perairan dan Udara Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Korpolaairud Baharkam Polri adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri yang bertugas antara lain menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
15. Kepala Korpolaairud Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kakorpolaairud adalah unsur pimpinan pada Korpolaairud Baharkam Polri yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri.

Pasal 2

SOP di lingkungan Baharkam Polri meliputi:

- a. Rapat kerja teknis Baharkam Polri;
- b. Mekanisme susunan rencana kebutuhan di lingkungan Baharkam Polri;
- c. usulan kenaikan pangkat Pns/Polri di lingkungan Baharkam Polri;
- d. Pengajuan usulan pengakhiran Dinas dari Polri/Pensiun;
- e. Pinjam pakai senjata Api di lingkungan Baharkam Polri;
- f. Pelatihan integrasi fungsi pemeliharaan keamanan di lingkungan Baharkam Polri;
- g. Penyusunan naskah kerja sama Baharkam Polri dengan inisiasi dari pihak lain;
- h. Sistem pelaporan berkala di lingkungan Baharkam Polri;
- i. Penunjukan dan pengajuan calon anggota polsus;

- 4 -

- j. Pendidikan dan pelatihan reguler;
- k. Pendidikan dan pelatihan khusus;
- l. Penerbitan KTA Polsus;
- m. Perpanjang KTA Polsus;
- n. Pendidikan dan pelatihan pengembangan;
- o. Peningkatan kemampuan;
- p. Pengawasan pembinaan teknis Polus;
- q. Pelatihan Kompetensi pawang satwa Polri;
- r. Bantuan teknis unit K-9 pelacak (kriminal umum/sar/handak/narkoba);
- s. Pemeriksaan kesehatan dan Dokumen K-9 baru;
- t. Penerbitan rekomendasi BUJP unit K-9;
- u. Unik K-9 penagkalan (penjagaan /pengawalan/patroli/dalmas
- v. Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
- w. Tanggap darurat terhadap kebakaran kapal Polisi;
- x. Tanggap darurat terhadap kapal kandas;
- y. Tanggap darurat terhadap orang jatuh di laut (*Man Over Board*);
- z. Tanggap darurat terhadap tubrukan kapal;
- aa. Penggunaan perbantuan pesawat udara Polri untuk kegiatan BKO Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Birorenmin Baharkam Polri.
- (2) SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Birobinops Baharkam Polri.
- (3) SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh Korbinmas Baharkam Polri
- (4) SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf q sampai dengan huruf u dilaksanakan oleh Korsabahara Baharkam Polri.
- (5) SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf v sampai dengan huruf aa dilaksanakan oleh Korpolaairud Baharkam Polri.

Pasal 4

SOP di lingkungan Baharkam Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaharkam Polri ini.



- 5 -

Pasal 5
Peraturan Kabaharkam Polri ini mulai berlaku pada tanggal
disahkan.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023

KEPALA BADAN PEMELIHARA DAN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2023

M. FADIL IMRAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN : PENYUSUNAN SOP

- 1. SURAT UNDANGAN**
- 2. ABSENSI**
- 3. SOP**

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-03/IX/SIP.1.1./2023/PKN II

Kepada: Daftar Nama Telampir

Dari : Kasilongmat Subdit Patroliair Selaku *Project Leader*

Perihal : undangan rapat.

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);
- c. Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: 2035/VIII/HUK.6.6./2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Efektif dalam rangka membantu AKBP Dr.Capt.Hendri Cahya Dwi Sancaka, S.ST., M.Mar., M.M. pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kehadiran Komandan, Senior dan rekan-rekan dalam acara rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

- a. hari / tanggal : Senin / 2 Oktober 2023;
- b. waktu : 08.00 WIB s.d selesai;
- c. tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri;
- d. pimpinan : Kasubbag Kerma Dagri Bagkerma Korpolaairud Baharka Polri Selaku Ketua Tim Efektif;
- e. acara : Penyusunan Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

3. Demikian

2.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

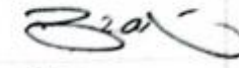
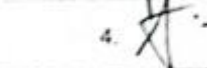
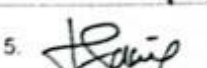
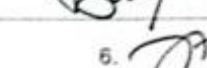
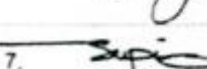
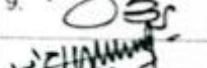
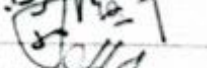
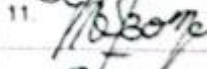
Jakarta, 29 September 2023
SUBDIT PATROLIAIR LONGMATA SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku PROJECT LEADER

Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

ABSENSI RAPAT KE - 3 TIM EFEKTIF
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Hari/Tanggal: Senin/2 Oktober 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5
1.	AGUNG HENDRI SUSANTO, S.E.Sy., M.M.	AKBP 69040511	KETUA TIM EFEKTIF	1. 
2.	HARRY GUNAWAN, S.Kom., M.M.	AKBP 73060625	ANGGOTA	2. 
3.	DICKY RAHADIAN EFFENDI, S.H.	KOMPOL 83091351	ANGGOTA	3. 
4.	KUWAT, S.ST.	KOMPOL 77050579	ANGGOTA	4. 
5.	YULI EKO SULISTYANTO, S.ST	KOMPOL 79071573	ANGGOTA	5. 
6.	ROIS ALI MARTA, S.H.	KOMPOL 79052195	ANGGOTA	6. 
7.	SUPRIYANTO, S.ST., M.M.	KOMPOL 82041533	ANGGOTA	7. 
8.	JOKO SUPRAYITNO, S.ST.	AKP 77120353	ANGGOTA	8. 
9.	HARI SISWADI, S.T.	AIPDA 82071423	ANGGOTA	9. 
10.	KHOIRON AYATULLOH	BRIGADIR 92030022	ANGGOTA	10. 
11.	DIMAS ARYONO PARAWIYOGO, S.H.	BRIGADIR 91070098	ANGGOTA	11. 
12.	AGUNG BUDI KUSUMA	PENGATUR TK. I 198808172008011001	ANGGOTA	12. 

Mengetahui,
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER



Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

A. PATROLI ALKI (ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA)

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN	Nomor SOP :
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal revisi :
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI
	Dr. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si. KOMISARIS JENDERAL POLISI
	Nama SOP : Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS (<i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i>); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan;	1. Sarjana hukum, sarjana ilmu pelayaran atau sarjana dibidang ilmu lain yang terkait dengan materi SOP Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia; 2. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa inggris; 3. memiliki kemampuan dalam berkomunikasi menggunakan radio; 4. memiliki kemampuan navigasi.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Patroli Perbatasan; 2. SOP Pemeriksaan Kapal;	1. Kapal Polisi; 2. peralatan pendukung; 3. Pesawat Udara Polri;
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengamanan ALKI tidak dilaksanakan maka potensi terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana terhadap kapal yang melintas ALKI meningkat.	1. Dicatat dalam jurnal harian kapal; 2. Disimpan dalam hard disk; 3. Disimpan dalam bentuk laporan.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			
		Kasub dit patroli air	Dirpol air Korpol airud	Ka Taud	kakor polair ud	Dan Kapal Polisi	Bintara komuni kasi(Ba komlek)	Pa Nops	Pa/Ba Nautika I, II, III	Ta Nautika I, II, III	KKM	Pa/Ba Teknika I, II, III	Ta Teknika I, II, III	Kelengka pan	waktu	Output
1.	Membuat surat usulan salahsatu / beberapa kapal untuk melaksanakan Patroli ALKI kepada Dirpolair Korpolairud		ya											Laporan informasi, laporan kejadian di ALKI, rencana kerja Ditpolair	1 jam	Konsep rencana Patroli ALKI
2.	Menerima surat usulan pelaksanaan Patroli ALKI, apabila Dirpolair menyetujui maka memberikan paraf dan meneruskan kepada Kakorpolairud melalui Kataud													Surat usulan kegiatan Patroli ALKI	1 jam	Disposisi
3.	Menerima surat permohonan pelaksanaan Patroli ALKI dari Dirpolair, selanjutnya memberikan paraf dan meneruskan kepada Kakorpolairud													disposisi	2 jam	Surat Perintah Tugas/TR
4.	Menerima surat permohonan Patroli ALKI, selanjutnya memberikan tanda tangan dan menyerahkan kepada Kataud untuk penomoran Surat													Surat Perintah Tugas/TR	1 jam	Surat Perintah Tugas/TR

STRATEGI KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI PADA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN HARKAMTIBMAS WILAYAH PERAIRAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana											Mutu Baku			
		Kasub dit patroli air	Dirpol air Korpol airud	Ka Taud	kakor polair ud	Dan Kapal Polisi	Bintara komuni kasi(Ba komlek)	Pa Nops	Pa/Ba Nautika I, II, III	Ta Nautika I, II, III	KKM	Pa/Ba Teknika I, II, III	Ta Teknika I, II, III	Kelengka pan	waktu	Output
5.	Menerima surat permohonan Patroli ALKI dari Kakorpolairud, selanjutnya memberikan nomor surat dan mendistribusikan kepada Komandan Kapal Polisi													Surat Perintah Tugas/ TR	2 jam	Surat Perintah Tugas/ TR
6.	menerima Surat Perintah dalam rangka Patroli ALKI, selanjutnya memerintahkan Pa Nops, Pa/Ba Komlek dan KKM untuk mempersiapkan kegiatan Patroli ALKI: a. Pa/Ba Nat I membuat perencanaan pelayaran dan peralatan Navigasi dibantu oleh Ta Nat I b. Pa/Ba Nat II menyiapkan administrasi dan alat-alat keselamatan dibantu oleh Ta Nat II c. Pa/Ba Nat III menyiapkan peralatan deck, selam dan persenjataan dibantu oleh Ta Nat III													Surat Perintah Tugas/ TR, kapal dan penduduknya	2 jam	Perintah lisan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku				
		Kasub dit patroli air	Dirpol air Korpol airud	Ka Taud	kakor polair ud	Dan Kapal Polisi	Bintara komuni kasi(Ba komlek)	Pa Nops	Pa/Ba Nautika I, II, III	Ta Nautika I, II, III	KKM	Pa/Ba Teknika I, II, III	Ta Teknika I, II, III	Kelengka pan	waktu	Output
	pelaksanaan kegiatan Patroli ALKI															
10.	Menerima dan melaksanakan perintah dari Komandan Kapal, selanjutnya melaporkan kepada Komandan Kapal Polisi													Perintah lisan	3 jam	laporan pelaksanaan kegiatan Patroli ALK
11.	Menerima laporan dari Pa/Ba Nat II, Pa/Ba Komlek dan KKM, selanjutnya Mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan patro ALKI kepada Dirpolair Korpolairud dengan tembusan Kasubdit Patroliair													Laporan Pelaksanaan Patroli ALKI	30 menit	Laporan Pelaksanaan Patroli ALKI
12.	Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Patroli ALKI dari Komandan Kapal, selanjutnya Mengirimkan laporan hasil kegiatan pelaksanaan Patroli ALKI kepada Kakorpolairud													Laporan Pelaksanaan Patroli ALKI	1 jam	Disposisi
13.	Menerima lapooran hasil kegiatan pelaksanaan Patroli ALKI													Laporan Pelaksanaan Patroli ALKI	1 jam	Pelaksanaan dan laporan patroli ALK selesai

**LAMPIRAN : SOSIALISASI DRAFT
KEBIJAKAN & BUKU PANDUAN**

- 1. SURAT UNDANGAN**
- 2. ABSENSI**
- 3. RISALAH SOSIALISASI**

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 7 /XI/SIP.1.1./2023/PKN II

Kepada: Yth. 1. Para Kasi
2. Para Kaurmin

Dari : Kasilongmat Subdit Patroliair

Perihal : undangan Sosialisasi

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kehadiran Komandan, Senior dan rekan-rekan dalam acara rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

- a. hari / tanggal : Senin / 13 November 2023;
- b. waktu : 08.00 WIB s.d selesai;
- c. tempat : Ruang Rapat Subdit Fasharkan Ditpolair;
- e. acara : Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Patroli ALKI.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

10 November 2023
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER

Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SUBDIT PATROLIAIR

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 8 /XI/SIP.1.1/2023/PKN II

Kepada: Yth. 1. Para Kasi
2. Para Kaurmin

Dari : Kasilongmat Subdit Patroliair

Perihal : undangan Sosialisasi

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1880/VIII/DIK.2.5./2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kehadiran Komandan, Senior dan rekan-rekan dalam acara rapat Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada:

- a. hari / tanggal : Rabu / 15 November 2023;
- b. waktu : 08.00 WIB s.d selesai;
- c. tempat : Gedung RP Soedardono;
- e. acara : Sosialisasi Buku Pedoman Patroli ALKI.

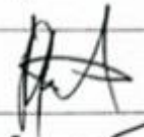
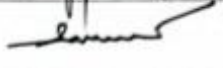
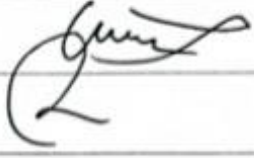
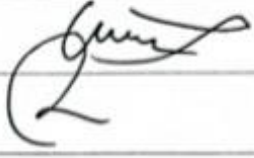
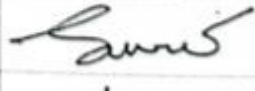
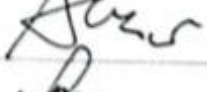
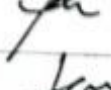
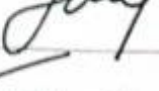
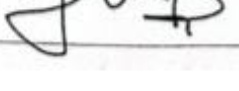
3. Demikian untuk menjadi maklum.

14 November 2023
KASIBIDIT PATROLIAIR
Selaku
PROJECT LEADER

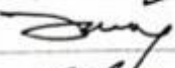
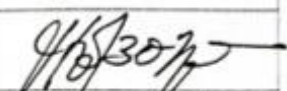
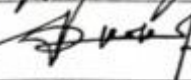
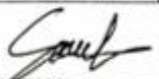
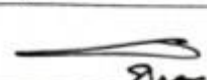
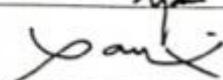
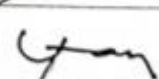
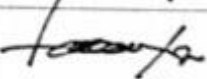
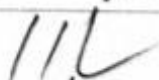
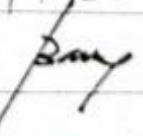

Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PATROLI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

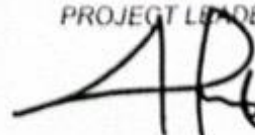
Hari/Tanggal: Senin/13 November 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	SATKER	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Syamsul Hadi	Kompel	Ditpolair	
2.	Buzutels W	Kompel	Ditpolair	
3.	Darmadi	1PTU	DITPOLAIR	
4.	Imam S	1PTU	Ditpolair	
5.	R. Manung	Kompel	DITPOLAIR	
6.	CARITO	Kompel	DITPOLAIR	
7.	DHARMA SUGAR	Kompel	DITPOLAIR	
8.	Daniel A.S	Kompel	Ditpolair	
9.	Sumardi	Kompel	Ditpolair	
10.	Masti B	Aty	Ditpolair	
11.	KUWAT	Kompel	Ditpolair	
12.	SULIKSAN	Kompel	DITPOLAIR	
13.	MUSTOPA	Kompel	DITPOLAIR	
14.	Tanjung D	1PTU	DITPOLAIR	
15.	Wahy S	km	DITPOLAIR	

2.

1	2	3	4	5
16	ERLANGGA	IPRU	DITPOLAIR	
17	FRANS	IPRU	DITPOLAIR	
18	RIHARD H.	APDO	DITPOLAIR	
19	DICKY S.	DITPOL A/N	DITPOL 8906063	
20	Dimas A.P	DITPOLAIR	BRIPOL 91070008	
21	ARIF K.P	DITPOLAIR	BHARAKA 91060188	
22	Sandi-raga P.	DITPOLAIR	Bharada 97120906	
23	Benny Raman	DITPOLAIR	Bharada 91060188	
24	Apen S	APDO	DITPOLAIR	
25	Samsuddin	BRIPOL	DITPOLAIR	
25	Maxora Hani	BRIPOL	DITPOLAIR	
27	M. Yamsar	BRIPOL	DITPOLAIR	
28	SURYADI	BHARADA	DITPOLAIR	
29	CATUN	BHARADA	DITPOLAIR	
30	Reza	BHARADA	DITPOLAIR	

MENGETAHUI
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER

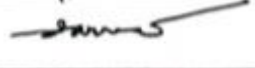
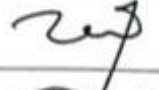
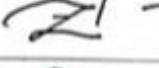
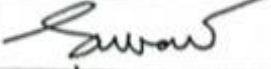
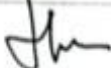
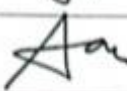
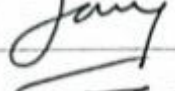
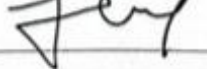


Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, M.Mar., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN

SOSIALISASI BUKU PEDOMAN
PATROLI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023

Hari/Tanggal: Rabu/15 November 2023

NO	NAMA	PANGKAT NRP	SATKER	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Syamsul Heli	Kompol	Atpolair	
2.	BURCHUG W	Kompol	DITPOLAIR	
3.	Darmadi	IPTU	DITPOLAIR	
4.	Imam S	IPTU	Atpolair	
5.	R. Manung	Kompol	DITPOLAIR	
6.	CARITO	Kompol	DITPOLAIR	
7.	DHARMA SREBAR	KOMPOL	DITPOLAIR	
8.	Daniel A.S	Kompol	Atpolair	
9.	Sumardi	Kompol	DITPOLAIR	
10.	Mastib	AKP	DITPOLAIR	
11.	KUWAT	KOMPOL	DITPOLAIR	
12.	SULIKANA	Kompol	DITPOLAIR	
13.	MURROPA	Kompol	DITPOLAIR	
14.	Tanjung D	IPTU	DITPOLAIR	
15.	Lucy S.C	IPTU	DITPOLAIR	

2.

1	2	3	4	5
16	QUANKA	IPRU	DIRPOLAIR	Yan
17	FRANK S	IPRU	DIRPOLAIR	Dirip
18	ALHAFID H	IPRU	DIRPOLAIR	Dirip
19	DICKY S.	BRIGADIR / 8908063	DIRPOLAIR	DS
20	Damas AP	Brigadir 9108088	Diripolair	9108088
21	Arief K.P	BHARAKA 9060188	DIRPOLAIR	9060188
22	Sandi -roga P.	Bharada / 9108088	Diripolair	9108088
23	Benny Priwan	Bharada / 9108088	Diripolair	9108088
24	Apen. J	AIPDA	Diripolair	An
25	Syamsuddin	Bripka	Diripolair	Yan
25	Marora Haven	BIPDA / 12	DIRPOLAIR	Yan
27	m. yammar	Bripka	Diripolair	Yan
28	SURYADI	BHARADA	DIRPOLAIR	Yan/2
29	CATUR	BHARADA	DIRPOLAIR	Yan
30	Peca	Bharada	Diripolair	Yan

MENGETAHUI
KASILONGMAT SUBDIT PATROLIAIR DIRPOLAIR
Selaku
PROJECT LEADER

(Signature)

Dr. Capt. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.Mar., M.M
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80091270

